



**MEMBANGUN POSTUR PERTAHANAN GUNA MENJAGA
KEAMANAN WILAYAH DI IBU KOTA NUSANTARA**

2023

Oleh :

MEKA YUDANTO

MARSEKAL PERTAMA TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

MEMBANGUN POSTUR PERTAHANAN GUNA MENJAGA KEAMANAN WILAYAH DI IBU KOTA NUSANTARA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kawasan Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru dengan nama Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Sebagai ibu kota negara maka IKN memiliki peran sentral dan strategis karena menjadi simbol suatu negara dalam menunjukkan jati diri sebagai sebuah negara dan bangsa. Ibu kota negara juga menjadi *center of gravity* (CoG) dalam sistem pertahanan negara sehingga membutuhkan postur pertahanan yang mampu menjaga dan melindungi simbol negara dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, pemindahan dan pembangunan ibu kota yang baru perlu didukung oleh pertahanan yang handal.

TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas fungsinya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, tidak terkecuali dalam mengamankan Ibu Kota Nusantara (IKN). TNI sebagai alat pertahanan negara perlu dibangun agar kuat karena suatu negara tanpa memiliki TNI yang kuat maka negara tersebut menjadi rapuh dan negara yang rapuh tidak akan mampu untuk membangun ekonomi dan kesejahteraannya. Terkait dengan pembangunan IKN maka TNI dituntut untuk mampu memetakan beberapa ancaman potensial yang dapat menghambat proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Pada tahap selanjutnya, setelah IKN selesai dibangun maka TNI dituntut mampu mengamankan wilayah ibu kota negara dari berbagai ancaman.

Mengingat IKN masih dalam proses pembangunan maka postur pertahanan harus dipersiapkan sedini mungkin dengan mempertimbangkan segala bentuk maupun potensi ancaman yang mungkin terjadi. Salah satu langkah nyata yang perlu dilakukan adalah melalui pembangunan postur pertahanan yang tangguh,

efektif, dan efisien sehingga mampu menjaga keamanan wilayah di IKN. Sampai saat ini, postur pertahanan yang dikhususkan untuk mengamankan wilayah ibu kota negara baru belum terbangun. Dari sisi kekuatan dan kemampuan, TNI telah memiliki berbagai jenis persenjataan namun penggelarannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan ibu kota negara yang berada di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, pembangunan postur pertahanan untuk menjaga dan melindungi IKN sudah menjadi keharusan.

Saat ini, ibu kota negara di Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan yang tinggi. Kecenderungan pemusatan instalasi strategis berada di Jakarta yang terletak dekat pintu masuk wilayah Indonesia dari Samudera Hindia dalam hal ini Selat Sunda sebagai jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I). Secara geostrategis posisi kota Jakarta ini kurang menguntungkan, karena lebih terbuka dari sisi pertahanan dan keamanan. Pemindahan ibu kota juga tidak semata didorong oleh pertimbangan kondisi ibukota yang lama yakni Jakarta yang sudah terlalu padat dan kurang tersedianya infrastruktur dan fasilitas perkotaan. Pertimbangan politik, sosial ekonomi serta pertahanan dan keamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara. Terkait dengan pertimbangan pertahanan dan keamanan, khususnya kekuatan udara, perlu adanya penggelaran kekuatan mulai dari pusat operasi, unsur tempur sergap, radar dan unsur rudal untuk pertahanan udara (hanud), baik memanfaatkan unsur hanud yang sudah tergelar saat ini maupun penambahan atau pengadaan baru dalam rangka melaksanakan operasi hanud di wilayah udara ibu kota negara baru.

Di sisi lain, keputusan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadirkan permasalahan dan tantangan baru sehingga perlu dilakukan kajian. Pemindahan ibu kota negara akan menjadi tonggak sejarah penting bagi Kabupaten PPU, terutama dalam hal pengaturan tata ruang wilayah pertahanan. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur telah menjadi program prioritas strategis dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan maka proses pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada

penyiapan dan penggelaran kekuatan militer (TNI) sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin.

Wilayah IKN terletak di sebelah selatan Kota Samarinda dan sebelah utara Kota Balikpapan, memiliki luas wilayah daratan seluas 256.142 Ha dan luas wilayah perairan laut seluas 68.189 Ha¹. Wilayah darat dan laut tersebut perlu mendapat jaminan keamanan dari kekuatan udara. Dengan kata lain, postur pertahanan harus mampu mengamankan wilayah seluas 324.331 hektar yang merupakan total luas wilayah daratan dan wilayah perairan laut secara terus menerus dari berbagai ancaman dan gangguan. Pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran wilayah udara di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Koopsudnas, pada tahun 2021 telah terjadi pelanggaran udara sebanyak 1.054². Sejumlah 1044 pelanggaran terjadi pada *Military Training Area (MTA) 2/RSAF* dan sebanyak 10 pelanggaran udara lainnya.

Berbagai pelanggaran tersebut, sejatinya merupakan ancaman militer sehingga harus dihadapi dengan kekuatan militer pula. Terlepas dari berbagai potensi ancaman militer tersebut, salah satu pertimbangan dalam menetapkan lokasi IKN adalah keunggulan wilayah yang strategis yaitu berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang selaras dengan visi sebagai “pusat gravitasi” ekonomi baru, serta dilalui oleh ALKI II di Selat Makassar yang memiliki peran penting sebagai jalur pelayaran laut utama nasional maupun regional. Lokasi IKN yang berdekatan dengan ALKI II tersebut, justru memiliki kerawanan dari sisi keamanan karena kapal dan pesawat udara asing memiliki hak untuk melintasi alur laut tersebut.

Kerawanan dari sisi keamanan tersebut perlu dihadapi melalui pembangunan postur pertahanan yang kuat. Pembangunan pertahanan di IKN tidak dapat dilepaskan dengan upaya membangun pertahanan negara yang bertujuan agar memiliki kekuatan pertahanan tangguh, sekaligus mampu melakukan upaya penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Pembangunan pertahanan negara, khususnya pertahanan militer perlu diselenggarakan secara terintegrasi dengan mengedepankan keterpaduan dari ketiga angkatan (AD, AL,

¹ Indonesia.go.id. (2022). Berapa Luas Wilayah Ibu Kota Negara Baru? Diakses dari <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/1617> pada 14 April 2023, pukul 22.05 WIB

² Okenews. (2022). Gelar Seminar Nasional, Pasis Sekkau A-111 Bahas CMAC Pasca FIR Indonesia-Singapura. Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2022/04/25/337/2585071/gelar-seminar-nasional-pasis-sekkau-a-111-bahas-cmac-pasca-fir-indonesia-singapura> pada 14 April 2023 Pukul 23.15 WIB

dan AU). Terlebih lagi, potensi ancaman nyata berada di darat karena berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia dan dekat dengan ALKI II yang merupakan jalur perdagangan dunia. Dengan demikian, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur membutuhkan kemampuan alutsista dari tiga matra TNI yang dapat menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Menjadi jelas bahwa dari dimensi pertahanan maka pemindahan ibu kota baru ini akan memunculkan potensi ancaman geostrategis yang berasal dari darat, laut, maupun udara yang tentunya berbeda dengan lokasi ibu kota saat ini di Jakarta. Lokasi IKN sebagai ibu kota negara dan sebagai pusat pemerintahan menjadi lebih dekat dengan perbatasan negara tetangga di bagian utara sehingga pembangunan postur pertahanan di IKN perlu mempertimbangkan pengaruh faktor Astagatra. Astagatra yang merupakan gabungan aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra) perlu menjadi pertimbangan dalam membangun postur pertahanan guna mengamankan wilayah IKN sehingga dapat menjamin kedaulatan negara. Aspek alamiah terdiri dari posisi geografi, kekayaan alam, dan kondisi penduduk. Sementara itu, aspek sosial meliputi: ideologi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

Postur pertahanan adalah perwujudan dari kekuatan pertahanan yang merupakan keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan pengeluaran³. Aspek kekuatan didefinisikan sebagai unsur-unsur tempur dari keseluruhan struktur pertahanan; aspek kemampuan adalah sumber daya dari kekuatan yang merupakan kemampuan suatu negara untuk melakukan tindakan militer tertentu; dan gelar adalah penempatan kekuatan tempur di tempat-tempat tertentu. Pembahasan tentang postur dalam naskah ini lebih berfokus pada postur pertahanan militer (TNI). Pasal 11 Ayat (1) UU 34/2004 tentang TNI menyebutkan bahwa "Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata". Perpindahan ibu kota negara, secara tidak langsung juga mengubah bentuk dan jenis ancaman militer dan ancaman bersenjata sehingga perlu strategi baru dalam menghadapinya.

³ Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 34/2004 tentang TNI

Postur pertahanan untuk menjaga dan melindungi IKN perlu dirumuskan melalui strategi yang matang dengan mempertimbangkan sisi kekuatan, kemampuan, dan penggelarannya. Postur pertahanan di IKN tidak terlepas dari tujuan pembangunan pertahanan negara yang tangguh dan mempunyai kemampuan penangkalan dari berbagai ancaman yang membahayakan kedaulatan negara. Pembangunan postur pertahanan negara, khususnya pertahanan militer merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk pengamanan di wilayah IKN. Pembangunan postur tersebut diselenggarakan secara terpadu dengan mengedepankan keterpaduan dari ketiga angkatan atau Tri Matra Terpadu. Keterpaduan dalam pembangunan sistem pertahanan udara pada wilayah ibu kota Kalimantan Timur menjadi keharusan karena menyangkut dengan pengamanan ibu kota negara. Keterpaduan (interoperabilitas) dibangun agar alutsista yang dimiliki antar TNI mampu bertukar dan menginterpretasikan data yang terkoneksi satu sama lain sehingga menjadi kekuatan pengganda bagi masing-masing angkatan.

2. Rumusan Masalah

TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengamankan ibu kota negara. Agar peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka TNI dituntut mampu mengenali kondisi wilayah, terutama dari dimensi ancaman yang membahayakan. Lokasi IKN yang terletak di Kalimantan Timur, ditinjau dari aspek pertahanan, memiliki beberapa keunggulan dan kerawanan. Dari sisi pertahanan udara maka berbagai kerawanan tersebut perlu dipersiapkan sedini mungkin melalui pembangunan postur pertahanan udara yang handal; baik dari aspek kekuatan, kemampuan maupun penggelarannya. Berbagai proyeksi ancaman militer dan pengaruh faktor astagatra juga menjadi pertimbangan penting dalam membangun postur pertahanan di IKN. Selain itu, perlu upaya strategis untuk membangun postur pertahanan di IKN yang mampu mensinergikan dengan matra lain guna memperkuat pengamanan di wilayah IKN. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: ***Bagaimana Membangun Postur Pertahanan Guna Menjaga Keamanan Wilayah Ibu Kota Nusantara?***

Dari rumusan masalah di atas maka diajukan beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana postur pertahanan udara yang tangguh, efektif, dan efisien?
- b. Bagaimana proyeksi ancaman militer di Ibu Kota Nusantara (IKN)?
- c. Bagaimana pengaruh faktor Astagatra di IKN yang menjadi pertimbangan membangun postur?
- d. Bagaimana upaya strategis untuk membangun postur pertahanan udara untuk pengamanan di wilayah IKN?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini untuk menganalisis, memberikan gambaran dan masukan tentang postur pertahanan udara yang handal, proyeksi ancaman militer di IKN, pengaruh faktor Astagatra di IKN yang menjadi pertimbangan membangun postur, dan upaya strategis untuk membangun postur pertahanan di wilayah IKN.
- b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan dalam membangun postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Kajian Kajian dalam Taskap ini dibatasi pada sektor pertahanan udara guna membahas postur pertahanan udara yang handal, proyeksi ancaman dari sisi militer yang akan dihadapi dan menjadi tugas TNI AU dalam mengamankan wilayah udara di IKN, pengaruh faktor Astagatra yang menjadi pertimbangan membangun postur, dan upaya strategis untuk membangun postur pertahanan dari aspek kekuatan, kemampuan, dan penggelarannya untuk pengamanan di wilayah IKN.

b. **Sistematika Penulisan.** Naskah analisis deskriptif tentang pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara ini disusun menjadi 4 (empat) bab dengan pokok-pokok uraian sebagai berikut:

1) **BAB I Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan permasalahan yang menjadi dasar pembahasan dalam naskah. Selain itu juga menjelaskan tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun naskah, metode dan pendekatan dalam menganalisis permasalahan atau pertanyaan kajian serta daftar pengertian agar diperoleh kesamaan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam naskah.

2) **BAB II Landasan Pemikiran.** Bab ini berisikan rangkuman hasil studi kepustakaan yang terkait dengan pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara, meliputi: tinjauan peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, dan lingkungan strategis yang memengaruhi. Rangkuman dari studi kepustakaan tersebut digunakan untuk menjawab dan menemukan solusi dalam menjawab beberapa pertanyaan kajian pada Taskap ini.

3) **BAB III Pembahasan.** Bab ini merupakan penjelasan dan jawaban secara komprehensif terhadap beberapa pertanyaan yang terangkum dalam pertanyaan kajian, meliputi: postur pertahanan udara yang handal, proyeksi ancaman militer di IKN, pengaruh faktor Astagatra yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial di IKN yang menjadi pertimbangan dalam membangun postur pertahanan, dan upaya strategis untuk membangun postur pertahanan di wilayah IKN. Keempat pertanyaan tersebut dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait; data dan fakta; dan tiga teori: ancaman negara, kebijakan pertahanan, dan postur kekuatan militer serta

pengaruh perkembangan lingkungan strategis; baik di tingkat global, regional, dan nasional.

4) **BAB IV Penutup.** Pada bab ini disampaikan tentang simpulan hasil kajian dari analisis yang dilaksanakan dan rekomendasi agar upaya membangun postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara dapat tercapai secara maksimal.

5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Penulisan tentang pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan/perundang-undangan, data dan fakta, dan pendekatan teori-teori yang terkait dengan obyek penulisan serta perkembangan lingkungan strategis (banglistra) yang berpengaruh. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

b. **Pendekatan.** Tulisan ini menggunakan pendekatan perspektif kepentingan nasional melalui analisis deskripsi kualitatif sesuai kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis postur pertahanan dan proyeksi ancaman di wilayah udara IKN yang dapat mengganggu kedaulatan negara, mempertimbangkan faktor Astragatra di wilayah Kalimantan Timur, dan upaya strategis untuk membangun postur pertahanan dari aspek kekuatan, kemampuan, dan penggelarannya dalam menghadapi potensi ancaman di IKN.

6. Pengertian

Untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dan persepsi serta menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam

penulisan naskah ini, maka diperlukan penjelasan terhadap beberapa pengertian, meliputi:

- a. **Air Defence Identification Zone (ADIZ).** Ruang udara tertentu di atas daratan dan perairan yang telah ditetapkan untuk identifikasi pesawat udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara⁴.
- b. **Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).** Alur laut yang telah ditetapkan sebagai hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional (PP 37/2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan)
- c. **Kawasan Udara Terlarang (*Prohibited Area*).** Pembatasan kawasan udara yang bersifat permanen bagi semua pesawat udara. Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, sebagai contoh instalasi nuklir atau istana Presiden (Penjelasan Pasal 7 (1) UU 1/2009 tentang Penerbangan).
- d. **Nusantara.** Sebutan atau nama yang mewakili keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia⁵. Dalam Taskap ini, ibu kota negara baru bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (Pasal 1 angka 2 UU 3/2022 tentang IKN).
- e. **Pertahanan Udara.** Pertahanan udara sebagai sistem merupakan bagian dari konsep pertahanan keamanan nasional. Pertahanan udara dikenal juga sebagai peperangan anti-pesawat, oleh NATO didefinisikan sebagai "semua tindakan yang dirancang guna membatalkan maupun mengurangi efektivitas aksi udara musuh"⁶.

⁴<https://tni.mil.id/view-130575-air-defense-identification-zone-adiz-indonesia-sebagai-perhatian-kohanudnas.html>

⁵ <https://kbbi.web.id/nusantara>.

⁶ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/air%20defense>

- f. **Tri Matra Terpadu.** Keterpaduan antar matra darat, laut, dan udara sebagai kekuatan militer sehingga menghasilkan kekuatan pertahanan negara yang kokoh, kuat, dan massif (Perpres 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024).
- g. **Wilayah Udara.** Wilayah kedaulatan udara yang berada di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia (Pasal 1 Angka 2 UU 1/2009 tentang Penerbangan).



BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah multidimensi yang selama ini terjadi di Jakarta. Dalam dimensi pertahanan, pemindahan ibu kota negara membawa konsekuensi terhadap pembangunan postur pertahanan yang handal, proyeksi ancaman yang dapat timbul sebagai konsekuensi berpindahnya lokasi ibu kota negara, adanya pengaruh faktor Astagatra di IKN yang perlu menjadi pertimbangan dalam membangun postur pertahanan, dan upaya strategis dalam membangun postur pertahanan udara untuk pengamanan di wilayah IKN. Pada bab ini berisikan rangkuman hasil studi kepustakaan yang terkait dengan pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara, meliputi: tinjauan peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, dan lingkungan strategis yang memengaruhi. Kesemua subbab tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis pada bab ketiga (pembahasan).

8. Peraturan Perundang-undangan

Dalam penyusunan naskah ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan pemikiran, antara lain:

a. Perundang-undangan

- 1) Konvensi Chicago (*Chicago Convention*) Tahun 1944

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyebutkan bahwa “Setiap negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya”. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki wewenang penuh dalam menjaga keamanan serta mengatur seluruh kegiatan penerbangan di wilayah udara nasionalnya. Pengamanan wilayah udara juga meliputi Tindakan

terhadap pesawat udara yang melanggar wilayah di wilayah udara nasional dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum.

2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Pembangunan IKN merupakan simbol kedaulatan negara yang telah ditinjau dari berbagai aspek, utamanya pada aspek pertahanan sebab adanya potensi berbagai ancaman. Dengan memahami berbagai potensi ancaman yang ada, maka negara dapat menata, menyiapkan, dan menggunakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga kedaulatannya.

3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Dalam undang-undang tersebut, pertahanan negara diartikan sebagai “Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Adapun tujuan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 adalah “Menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. Tujuan tersebut relevan dengan fungsi pertahanan negara yang tertuang dalam Pasal 5 yaitu “Mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan”. Dengan adanya IKN, maka perlu dibangun postur pertahanan negara dalam menghadapi berbagai potensi ancaman militer untuk menjamin keamanan IKN dan melindungi kedaulatan NKRI dengan menempatkan TNI sebagai unsur utama pertahanan negara.

4) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dalam Pasal 4 disebutkan “TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima”. Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, dalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai penangkal setiap bentuk ancaman militer baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara geografis, IKN memiliki kerentanan yang tinggi terhadap potensi ancaman dari luar, khususnya dari udara. Oleh karenanya, TNI harus mampu menghalangi musuh yang memasuki wilayah NKRI dengan mendeteksi adanya potensi ancaman yang ada dan mengidentifikasinya untuk melakukan upaya penindakan dalam rangka mengatasi ancaman musuh jika melakukan manuver di wilayah Indonesia.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan wilayah NKRI yang meliputi wilayah darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, serta seluruh kekayaan di dalamnya. Penentuan batas wilayah di masing-masing negara ditentukan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral, perundang-undangan serta hukum internasional mengenai batas wilayah negara. Ketentuan tersebut berlaku untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lainnya, seperti batas Indonesia dengan India, Filipina, Papua Nugini, Palau, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Untuk wilayah Indonesia yang tidak berbatasan langsung dengan negara lain, maka Indonesia dapat menetapkan batas wilayah yurisdiksi secara unilateral berdasarkan

ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang berlaku.

6) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Merujuk pada Pasal 2 dalam undang-undang tersebut, visi Ibu Kota Nusantara (IKN) antara lain adalah menjadi kota dunia yang berkelanjutan, menjadi penggerak ekonomi Indonesia serta menjadi simbol identitas nasional. Pengembangan IKN bertujuan untuk memenuhi fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan negara asing serta lembaga internasional di Indonesia. Dalam proses pengelolaannya, Pemerintah Daerah Khusus IKN berwenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya yang meliputi wilayah daratan dengan luas wilayah berkisar 256.142 hektar serta wilayah perairan laut dengan luas berkisar 68.189 hektar dengan tetap memperhatikan peraturan, prinsip dan asas yang tercantum dalam perundangan ini. Mengacu pada hal tersebut maka IKN akan menjadi pusat pemerintahan, TNI khususnya TNI Angkatan Udara memiliki tugas untuk melindungi IKN dari segala potensi ancaman di wilayah udara. Oleh karenanya dibutuhkan postur pertahanan dan kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara untuk melindungi ibu kota negara baru.

b. **Peraturan**

1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Pemerintah pusat memiliki wewenang mutlak dalam menetapkan wilayah pertahanan. Pasal 7 yang mengatakan bahwa “Wilayah pertahanan yang tercakup pada pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan instalasi militer merupakan lampiran yang tidak terpisah dari peraturan pemerintah”, sementara untuk wilayah pertahanan meliputi: daerah uji coba peralatan dan

persenjataan militer; penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; disposal peralatan pertahanan dan amunisi; objek vital nasional yang bersifat strategis; dan kepentingan pertahanan udara.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 75 mengatur bahwa “Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan; pertumbuhan ekonomi; sosial dan budaya; pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup”.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Dalam penyelenggaraan kedaulatan negara terhadap wilayah udara, pemerintah melakukan wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur ruang udara untuk kepentingan penerbangan, pertahanan dan keamanan negara, perekonomian nasional, sosial budaya, serta lingkungan udara”. Pada bagian penjelasan untuk pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara adalah pengaturan untuk kepentingan tertentu seperti menetapkan daerah atau kawasan udara terlarang (*prohibited area*), kawasan udara terbatas (*restricted area*), dan kawasan untuk melakukan identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ ADIZ*)”.

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kemampuan pertahanan dilakukan melalui: pembangunan postur

TNI yang mempunyai kemampuan dalam melakukan daya tangkal strategis dan memiliki mobilitas yang tinggi untuk diproyeksikan, baik di dalam maupun luar wilayah yurisdiksi NKRI dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

9. Data dan Fakta

Data dan fakta yang digunakan dalam mendukung pembahasan tentang pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara ini terkait dengan kekuatan angkatan bersenjata dari negara China dan lima negara (*five power defence arrangement/FPDA*) terdiri dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Fakta bahwa kekuatan militer China telah berkembang dengan pesat, bahkan mampu mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat. Demikian juga dengan pembentukan FPDA untuk membantu negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia dan Singapura karena kedua negara tersebut menganggap Indonesia sebagai ancaman. Data berikutnya adalah pelanggaran wilayah udara yang terdeteksi oleh Kosek IKN dari tahun 2021 – 2023 dan jumlah kapal yang memanfaatkan ALKI I, II, dan III sebagai rute pelayarannya pada 2023. Berdasarkan data dari Kosek IKN diketahui bahwa pelanggaran wilayah udara selalu terjadi, bahkan dari waktu ke waktu semakin meningkat.

a. Kekuatan Militer China

China dalam sepuluh tahun terakhir telah memperbarui pasukannya menjadi yang terbesar di dunia, membangun angkatan laut terbesar di dunia, serta terus mengembangkan persenjataan nuklir dan balistik. Amerika Serikat (AS) bahkan menempatkan China sebagai musuh yang mengancam bagi keberlangsungan hegemoni AS di tataran global. Hal ini dikarenakan China memiliki kekuatan militer yang kuat sehingga disegani oleh AS dan sekutunya. Kekuatan militer China diperkuat oleh 2,3 juta personel aktif dengan kekuatan cadangan mencapai delapan juta personel. Angkatan Laut China menjadi yang terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal perang dan kapal selam. China memiliki kapal perang dan kapal selam

sebanyak 777 unit⁷. Kekuatan udara China memiliki 4.182 pesawat, 1.150 jet tempur, 629 jet multi peran, 270 pesawat serang, dan 1.170 helikopter. Sementara untuk kekuatan darat memiliki 7.760 tank, 6.000 kendaraan tempur lapis baja, 9.726 artileri, dan 1.770 roket artileri. Dari sisi anggaran pertahanan, China mengalokasikan 228 miliar dolar AS per tahun⁸.

b. ***Five Power Defence Arrangement (FPDA).***

1) Australia. Kekuatan matra darat Australia terdiri dari 44.700 personel (30.400 aktif dan 14.300 cadangan) dengan komposisi 7 batalion infanteri, 6 resimen kavaleri, 7 resimen artileri medan, 2 resimen zeni, 5 resimen perhubungan, 3 resimen pasukan khusus, 1 resimen artileri pertahanan udara, 4 resimen/brigade penerbangan angkatan darat. Kekuatan matra lautnya terdiri dari 16.200 personel (14.400 aktif dan 1.800 cadangan) dengan alutsista 6 unit kapal selam, 11 unit *frigate*, 2 unit LHD, 15 unit kapal patroli, 6 unit *mine hunter* dan 2 kapal *hydrographics*. Kekuatan matra udaranya terdiri dari 17.500 personel (14.400 aktif dan 3.100 cadangan) dengan alutsista 5 skadron pesawat tempur (F-18), 6 skadron pesawat angkut (C-17A, C-130, C-27, King Air 350, Boeing BBJ, Airbus KC-30A), 1 skadron pesawat C4ISR (AEW&C, UAV) dan 2 skadron pesawat maritim (Lockheed Martin AP-3C Orion) dengan anggaran pertahanan pada tahun 2017 sebesar USD 27.903 M.⁹

2) Malaysia. Kekuatan militer Malaysia terdiri dari 410.000 personel militer dengan total 12.587.121 populasi yang layak untuk wajib militer. Kekuatan matra darat terdiri dari 74 tank, 1.387 kendaraan tempur lapis baja, 211 artileri dan 54 proyektor roket. Kekuatan matra lautnya terdiri dari 6 fregat, 6 korvet, 2 kapal selam, 41 kapal patrol, dan 4 kapal ranjau. Sementara untuk kekuatan matra

⁷<https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/10/05/kekuatan-militer-china-berkembang-drastis-dalam-satu-dekade>

⁸ <https://internasional.republika.co.id/berita/qg0s0z382/adu-kekuatan-militer-china-dan-india-mana-yang-lebih-kuat>

⁹Information Handling Services Jane's, www.ihs.com.

udaranya terdiri dari 26 pesawat tempur, 13 pesawat serbu, 18 pengangkut, 40 pesawat tempur latihan, 4 pesawat untuk misi khusus, dan 65 helicopter. Anggaran pertahanan pada tahun 2019 sebesar USD 3.87 miliar¹⁰.

3) Singapura. Kekuatan militer Singapura sebanyak 385.000 personel yang terdiri dari 72.000 personel aktif dan 312.500 personel cadangan. Kekuatan matra darat terdiri dari 180 tank, 3000 kendaraan tempur baja, 48 artileri swa-gerak, 77 artileri medan, dan 24 roket proyektor roket. Kekuatan matra lautnya sebanyak 40 alutsista yang terdiri dari 6 fregat, 6 korvet, 11 kapal patroli, dan 4 kapal ranjau. Kekuatan matra udara terdiri dari 100 pesawat tempur, 9 pesawat angkut, 36 pesawat tempur latihan, 9 pesawat misi khusus, dan 94 helicopter. Anggaran pertahanan pada tahun 2020 sebesar 15.5 miliar dollar Singapura (11.5 miliar USD)¹¹.

4) Selandia Baru. Kekuatan militer Selandia baru sebanyak 12.245 personel¹². Kekuatan matra darat Selandia Baru terdiri dari 6.584 personel dengan komposisi 2 batalion infanteri, 1 resimen kavaleri, 1 resimen artileri, 1 resimen zeni, 1 resimen pasukan khusus. Kekuatan matra lautnya terdiri dari 2.830 personel dengan alutsista 2 unit *frigate*, 2 unit kapal pendarat, 6 unit kapal patroli, 1 unit *multirole vessel*. Kekuatan matra udaranya terdiri dari 2.831 personel dengan alutsista 2 skadron pesawat angkut (C-130, Boeing 757, King Air 200), 2 skadron pesawat maritim (P-3K2 Orion). Total anggaran pertahanan pada tahun 2023 sebesar USD 3.3 M¹³.

5) Inggris. Kekuatan militer Inggris sejumlah 231.000 personel pada 2022, terdiri dari 166.700 personel aktif dan 64.300 personel

¹⁰ tirta.id. (2023). Kekuatan Militer Malaysia dan Strategi Pertahanan Jangka Panjang. <https://tirta.id/kekuatan-militer-malaysia-dan-strategi-pertahanan-jangka-panjang-fk6x>

¹¹ tirta.id. (2023). Kekuatan Militer Singapura 2020, dari Pasukan hingga Senjata. <https://tirta.id/kekuatan-militer-singapura-2020-dari-pasukan-hingga-senjata-fQCE>

¹² defence.govt.nz. (2023). Defence Force Facts and Figures. <https://www.defence.govt.nz/engage/defence-force-facts-and-figures/>

¹³ defensenews.com. (2023). New Zealand unveils defense budget, with Army in the lead. <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2023/05/18/new-zealand-unveils-defense-budget-with-army-in-the-lead/>

cadangan. Kekuatan matra darat Inggris terdiri dari 102.700 personel dengan komposisi 14 batalion infanteri mekanis, 15 batalion infanteri, 3 batalion lintas udara, 3 resimen tank, 6 resimen kavaleri pengintai, 7 resimen artileri. Kekuatan matra lautnya terdiri dari 31.200 personel dengan alutsista 11 unit kapal selam, 5 unit kapal amphibious warfare, 13 unit frigate, 1 unit LHD, 4 unit kapal patroli, 6 unit destroyer, 15 unit mine hunter, 25 unit helikopter angkut, 68 unit helikopter serbu maritim dan 3 batalion marinir. Kekuatan matra udaranya terdiri dari 32.800 personel dengan alutsista 201 unit pesawat tempur (Tornado, Thypoon, F-35B), 43 unit pesawat angkut (C-17, C-130, A-400M), 14 unit pesawat tanker (A330) 18 unit pesawat C4ISR, 83 unit helikopter angkut (Chinook, Puma dan 40 unit UAV (MQ-9 Reaper) dengan anggaran pertahanan pada tahun 2022 sebesar USD 68 M¹⁴.

c. Pelanggaran Wilayah Udara

Pelanggaran wilayah udara merupakan ancaman keamanan wilayah udara di IKN yang berpotensi terjadi karena letak IKN sangat dekat dengan jalur ALKI II yang merupakan jalur perdagangan dan pelayaran internasional yang bernilai strategis. Data Pelanggaran Wilayah Udara di Kosek IKN tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Wilayah Udara di Kosek IKN Tahun 2021

NO	TGL	CALLSIGN	TIPE	KATEGORI	NEGARA	RUTE	KET	JML
1	26-03-2021	N9688R	E55P	SIPIL	NIL	KINABALU-SUBANG	NO FC	1
2	26-07-2021	TMN596	B-767	SIPIL	SINGAPURA	SINGAPURA-DARWIN	NO FC	1
3	10-08-2021	ADB310F	AN-124-100M	SIPIL	UKRAINA	NAGOYA-SINGAPURA	NO FC	1
4	3-10-2021	ANG6393	B-763	SIPIL	PAPUA NUGINI	SIN-PORT MORESBY	NO FC	1
5	23-11-2021	MAS6203	A332	SIPIL	MALAYSIA	KUALA LUMPUR-SYDNEY	LASA T	1
6	25-11-2021	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	LASA X	1
7	25-11-2021	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	LASA X	1
8	25-11-2021	NIL	B-1 LANCER	MILITER	AMERIKA	NIL	LASA X	1
9	25-11-2021	NIL	B-1 LANCER	MILITER	AMERIKA	NIL	LASA X	1
10	10-12-2021	UKL 5020	AN12BK	SIPIL	UKRAINA	JOHOR BARU-KINABALU	LASA T	1
							TOTAL	10

Sumber: Kosek IKN, 2023

¹⁴ wartaekonomi. (2022). Negara Militer Terkuat: Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris Raya yang Tak Diragukan Lagi Kiprahnya di Global. <https://wartaekonomi.co.id/read443676/negara-militer-terkuat-angkatan-bersenjata-kerajaan-inggris-raya-yang-tak-diragukan-lagi-kiprahnya-di-global>

Tabel 2. Data Pelanggaran Wilayah Udara di Kosek IKN Tahun 2022

NO	TGL	CALLSIGN	TIPE	KATEGORI	NEGARA	RUTE	KET	JML
1	17-01-2022	DAAEP	A-321	SIPIL	GERMANY	SELETAR-GUAM	NO FC	1
2	02-03-2022	F-HHCB	DASSAULT FALCON 8X	SIPIL	PERANCIS	KINABALU-SUBANG	NO FC	1
3	13-05-2022	VOR-06	Diamond DA62	SIPIL	INGGRIS	KUCHING-JOHOR BARU	NO FC	1
4	02-06-2022	VPCPY	GLF5	SIPIL	CAYMAN ISLAND	MANILA-SELETAR	NO FC	1
5	24-06-2022	2MXBB	A-330	SIPIL	SINGAPURA	PHILIPINA-SINGAPURA	NO FC	1
6	16-08-2022	FUSES77	C-130J	MILITER	USA	P. LEBAR-KADENA	NO FC	1
7	30-08-2022	AZG 2634	BOEING 747-467F	SIPIL	AZERBAIJAN	BRUNEI-SINGAPURA	NO FC	1
8	30-08-2022	N405LA	GULFSTRE AM G550	SIPIL	AMERIKA	GUAM-SELETAR	NO FC	1
9	05-09-2022	N4CE	DASSAULT FALCON 7X	SIPIL	AMERIKA	GUAM-SELETAR	NO FC	1
10	24-09-2022	RPC4203	ATR42	SIPIL	PHILIPINA	SUBANG-PHILIPINA	NO FC	1
11	28-09-2022	KRH647	A21N	SIPIL	BRITANIA RAYA	SEOUL-SINGAPURA	NO FC	1
12	02-10-2022	N926PN	BD 700	SIPIL	AMERIKA	SELETAR-SENDAI	NO FC	1
13	03-10-2022	N711LS	BD 700	SIPIL	AMERIKA	SELETAR-NAGOYA	NO FC	1
14	03-10-2022	N588TN	G500	SIPIL	AMERIKA	SELETAR-TOKYO	NO FC	1
15	24-10-2022	CGSAG	PILATUS PC-12/45	SIPIL	CANADA	HAT YAI AIRPORT-SELETAR	NO FC	1
16	01-12-2022	ICE1241	BOEING 757-23N	SIPIL	ISLANDIA	CHANGI-SANDAKAN	NO FC	1
17	03-12-2022	JA04AA	C680	SIPIL	JAPAN	PHILIPINA-SUBANG	NO FC	1
18	11-12-2022	VPCTW	GLF650	SIPIL	CAYMAN ISLAND	SELETAR-TOKYO	NO FC	1
19	12-12-2022	N334CA	BE-30	SIPIL	AMERIKA	P. LEBAR-PHILIPINA	NO FC	1
20	12-12-2022	N117TG	C-130	SIPIL	AMERIKA	JOHOR-JOHOR	NO FC	1
21	22-12-2022	QQE532	GLF650ER	SIPIL	QATAR	TOKYO-SELETAR	NO FC	1
22	29-12-2022	N707DN	B77L	SIPIL	UNITED STATES	CALIFORNIA-SINGAPURA	NO FC	1
							TOTAL	22

Sumber: Kosek IKN, 2023

Tabel 3. Data Pelanggaran Wilayah Udara di Kosek IKN (Januari-Mei 2023)

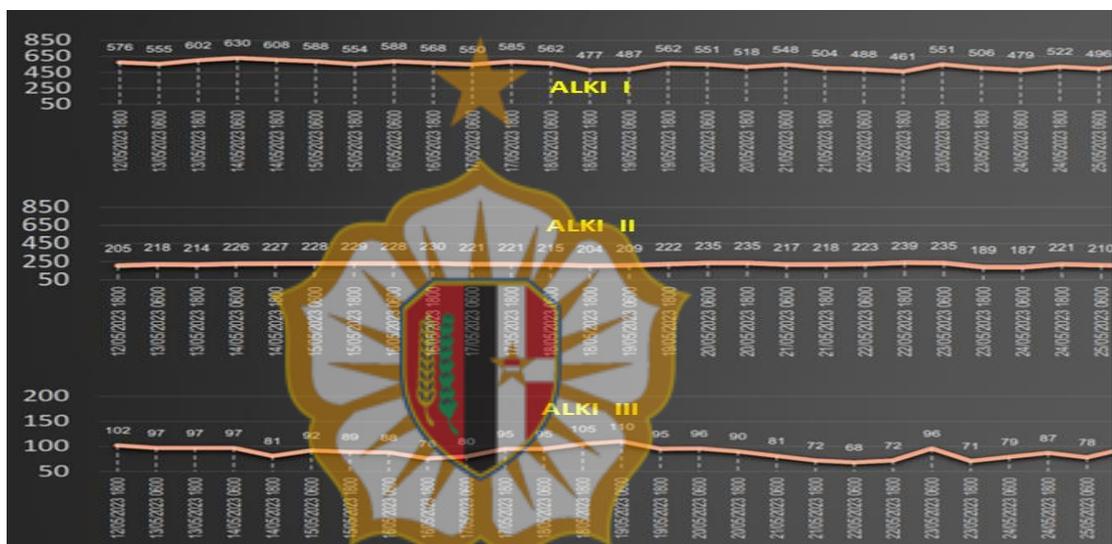
NO	TGL	CALLSIGN	TIPE	KATEGORI	NEGARA	RUTE	KET	JML
1	25-1-2023	N704DK	B77L	SIPIL	AMERIKA SERIKAT	ANCHORAGE-SINGAPURA	LASA T	1
2	3-3-2023	CMB496	CN 35	SIPIL	AMERIKA SERIKAT	P. LEBAR-BRUNEI	LASA T	1
3	8-3-2023	N349CA	BE 350	SIPIL	AMERIKA SERIKAT	P. LEBAR-PHILIPINA	LASA T	1
4	12-4-2023	CEF05G	A 319	SIPIL	CZECH REPUBLIC	CHANGI-KOREA	LASA T	1
5	2-5-2023	CEF05G	C 130	MILITER	AMERIKA SERIKAT	KADENA-PAYA LEBAR	LASA T	1
6	3-5-2023	TREK 599	C 130 J	MILITER	AMERIKA SERIKAT	PAYA LEBAR-KADENA	LASA T	2
7	3-5-2023	TREK 051	C 130 J	MILITER	AMERIKA SERIKAT	PAYA LEBAR-KADENA		
8	4-5-2023	OEGWV	C56X	SIPIL	AUSTRIA	BRUNEI-PUKET	LASA T	2
9	4-5-2023	REPAT 72	C 17A	MILITER	AMERIKA SERIKAT	KADENA-PAYA LEBAR		
10	7-5-2023	IFC324	B 738-800	MILITER	INDIA	PAYA LEBAR-PAYA LEBAR	LASA T	1
11	8-5-2023	IFC324	B 738-800	MILITER	INDIA	PAYA LEBAR-PAYA LEBAR	LASA T	2
12	8-5-2023	TREK 051	C 130 J	MILITER	AMERIKA SERIKAT	KADENA-PAYA LEBAR		
13	16-5-2023	CATA 303	D 328	MILITER	AMERIKA SERIKAT	KINABALU-PAYA LEBAR	LASA T	1
14	18-5-2023	AG205	C 130	MILITER	KOREA	PHILIPINA-KUANTAN	LASA T	1
							TOTAL	14

Sumber: Kosek IKN, 2023

d. Kapal Melintasi ALKI

Jumlah kapal yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) cukup banyak dan secara umum jumlahnya relatif tetap. Berdasarkan data pelayaran pada 12 -25 Mei 2023; jumlah terbanyak di ALKI I sebanyak 461-630 kapal, diikuti oleh ALKI II sebanyak 187-235 kapal, dan ALKI III sebanyak 68-110 kapal.

Tabel 4. Jumlah Kapal Yang Melintasi ALKI (12-25 Mei 2023)



Sumber: Mabesal, 2023

10. Kerangka Teoritis

a. Teori Ancaman Negara

Teori ancaman negara yang disebutkan oleh Stephen M. Walt (dalam Sagena¹⁵) menyatakan bahwa ancaman negara dapat bersumber dari kekuatan militer dan nonmiliter yang dapat membahayakan individu hingga negara. Lebih spesifik, pandangan Indonesia yang tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia¹⁶, ancaman adalah semua usaha maupun kegiatan, baik dari luar ataupun dari dalam negeri, yang dianggap

¹⁵ Sagena, UW. (2013). Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Interdependence*, Th. 1, Vol. 1, Januari-April 2013, h. 73

¹⁶ Kemenhan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, h. 22

membahayakan atau mengancam kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah negara. Berdasarkan bentuk ancamannya, maka ancaman dikategorikan sebagai ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

1) Ancaman Militer. Ancaman adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, seperti agresi, pemberontakan bersenjata, ancaman keamanan udara dan laut, dan lain-lain.

2) Ancaman Nonmiliter. Menurut Bedeski, ancaman keamanan non-konvensional disebabkan oleh aktivitas nonmiliter dari individu, kelompok dan negara yang bersifat kumulatif (Bedeski, 1992¹⁷). Aktivitas ini pada umumnya tidak dianggap sebagai ancaman, namun dalam jangka pendek memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kondisi kehidupan di dalam batas negara. Ancaman non-konvensional atau aktivitas nonmiliter bukan ancaman yang eksplisit atau disengaja dilakukan dari pemerintah sehingga hal tersebut membuat ancaman non-konvensional sulit untuk diidentifikasi dan diselesaikan.

b. Teori Kebijakan Pertahanan

Kebijakan merupakan suatu pernyataan tentang suatu niat (intent) untuk memandu dalam proses pengambilan keputusan, menerjemahkan visi menjadi aksi, dan suatu kerangka kerja untuk bertindak. Dalam hal ini, kebijakan pertahanan merupakan suatu rencana aksi dalam bidang pertahanan yang digunakan sebagai panduan bagi pengambilan keputusan di masa depan yang berkaitan dengan pertahanan dan militer (Supriyanto, 2014¹⁸). Kebijakan pertahanan negara tersebut perlu dijabarkan dalam strategi pertahanan yang dijabarkan lagi dalam postur pertahanan. Pembangunan postur pertahanan dengan mempertimbangkan apa dan siapa ancaman terhadap negara, bagaimana menentukan ancaman di masa depan, dan apa tindakan yang akan diambil untuk menghadapinya.

¹⁷ Bedeski, Robert E. (1992). *Unconventional Security Threats: An Overview*. North Pacific Cooperative Security Dialogue, Research Programme, New York University

¹⁸ Supriyanto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 130

c. **Teori Postur Kekuatan Militer**

Teori perencanaan postur kekuatan dan kemampuan, sebagaimana disebutkan oleh Bartlett (dalam Kharis, et.al¹⁹) bahwa perencanaan pola gelar kekuatan dan kemampuan militer menentukan 4 (empat) kemampuan tempur, terdiri dari: kesiapan, logistik, modernisasi, dan struktur kekuatan. Secara umum, postur pertahanan terdiri dari tiga elemen yaitu: kekuatan, kemampuan, dan gelar. Kekuatan dan kemampuan pertahanan negara lain perlu diketahui, termasuk pola penggelarannya. Khusus untuk pola gelar kekuatan matra udara, harus menyesuaikan dengan ancaman yang ada saat ini dan ancaman yang kemungkinan akan terjadi di masa depan dengan perkembangan modernisasi alutsista yang nantinya akan dimiliki oleh negara tetangga. Pola gelar kekuatan militer tersebut nantinya harus dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk menjaga pertahanan dan keamanan IKN.

11. **Lingkungan Strategis**

Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi saat ini memiliki pengaruh yang sangat dominan dan menjadi *driver* utama bagi hampir seluruh negara dalam menyusun kebijakan pertahanannya termasuk Indonesia. Lingkungan strategis Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang cukup kompleks, diantaranya adalah perkembangan teknologi, trend media sosial, globalisasi, pengaruh budaya asing yang terus menggerus kepribadian bangsa dan ideologi-ideologi asing yang terkadang cenderung ekstrim. Berikut uraian singkat tentang perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional, dan nasional yang berpengaruh terhadap pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara:

- a. **Tingkat Global.** Perkembangan lingkungan strategis pada faktor eksternal terkait dengan adanya perubahan bentuk dominasi negara, persaingan global dan kemajuan teknologi informasi. Kondisi tersebut

¹⁹ Kharish, L., Syahtaria, I., Sianturi, D., et.al (2022). *Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2 No. 8, h. 2852

menyebabkan berkurangnya hegemoni suatu negara terhadap negara lain, perebutan pasar global dan disinformasi sehingga dapat memengaruhi kondisi domestik sebuah negara. Pengaruh lingkungan strategis di tingkat global yang terkait dengan pembangunan postur pertahanan negara di ibu kota baru adalah:

1) Pada tataran global, geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan diantara negara besar, terutama antara Amerika dan Rusia. Perang antara Rusia dan Ukraina bukan dilatarbelakangi oleh penguasaan sumberdaya alam, melainkan lebih didasari oleh kepentingan Rusia dalam meniadakan hegemoni Amerika dan negara-negara Eropa di negara-negara terdekat dengan Rusia. Rusia sebagai negara besar yang memiliki kekuatan militer dan berbagai sumberdaya energi telah memperhitungkan berbagai dampak perang yang dilakukan. Di sisi lain, beberapa negara Eropa memiliki ketergantungan pasokan energi dari Rusia. Kondisi tersebut mengharuskan negara-negara di dunia untuk semakin menyadari bahwa perang bisa terjadi kapan saja sehingga perlu membangun postur pertahanan yang handal.

2) Perkembangan lingkup global yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam negeri adalah persaingan dagang (ekonomi) antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ditambah lagi adanya unjuk kekuatan militer antar kedua negara terhadap isu Laut Cina Selatan (LCS) dapat memengaruhi kondisi keamanan regional dan dalam negeri Indonesia, khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas keamanan, dan perdamaian di negara-negara yang lokasinya berdekatan dengan LCS.

b. **Tingkat Regional.** Perkembangan lingkungan strategis di tingkat regional yang terkait dengan pembangunan postur pertahanan negara di ibu kota baru adalah:

1) Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman

yang dapat mengganggu stabilitas kawasan yaitu konflik antara China dengan Taiwan. Invasi Rusia terhadap Ukraina dapat menjadi pemicu bagi China untuk menginvasi Taiwan. Dalam hal ini, China mempelajari bagaimana reaksi negara-negara Eropa terhadap invasi yang dilakukan oleh suatu negara. Potensi konflik China-Taiwan diharapkan tidak memengaruhi kondisi keamanan, khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas, serta perdamaian di kawasan.

2) Isu yang dihadapi di tataran regional adalah adanya modernisasi kekuatan militer (khususnya China dan India), isu perbatasan antar negara, isu senjata pemusnah masal, konflik intra dan antar negara, terorisme, radikalisme, kejahatan lintas negara, dan kecenderungan konflik kontemporer. Isu-isu terkait ancaman keamanan tersebut apabila tidak dapat diselesaikan secara bersama melalui kerjasama dan saling menghormati sesama negara dapat mengancam stabilitas kawasan.

c. Tingkat Nasional. Perkembangan lingkungan strategis (Banglistra) pada tingkat nasional terkait dengan pengelolaan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan dapat menimbulkan ketidakamanan (*insecurity*). Banglistra tersebut menunjukkan bahwa hakikat, sifat, dan bentuk ancaman semakin kompleks sehingga dibutuhkan keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman. Pemindahan ibu kota negara tidak hanya ditinjau dari pembangunan gedung-gedung maupun infrastruktur lainnya, namun harus mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan. Resume singkat tentang pengaruh kondisi lingkungan dalam negeri (internal) Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Geografi. Indonesia berbatasan dengan banyak negara sehingga lalu lintas pelayaran dan penerbangan yang memanfaatkan alur laut kepulauan dan ruang udara Indonesia, sangat banyak dan padat. Kepadatan lalu lintas kapal dan pesawat udara, dari sisi

pertahanan perlu mendapat pengawasan yang ketat. Khusus di wilayah IKN, dekat dengan ALKI II dan berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia sehingga secara geografi memiliki tingkat ancaman yang cukup rawan. Untuk itu, interoperabilitas antar matra juga perlu sehingga pengamanan ALKI II dan perbatasan darat menjadi semakin efektif.

2) Demografi. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di tingkat dunia, diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat dan mencapai 305,6 juta di tahun 2035. Jumlah tersebut didominasi oleh usia produktif sebanyak 70% dari total penduduk²⁰. Banyaknya penduduk usia produktif tersebut sering disebut sebagai bonus demografi (*demographic dividen*). Terkait dengan sektor pertahanan, usia produktif tersebut dapat menjadi komponen cadangan (Komcad) pertahanan negara. Keikutsertaan sebagai Komcad bersifat sukarela, namun apabila negara benar-benar membutuhkan dukungan kekuatan dari rakyat maka lebih mudah memperoleh dukungan kekuatan dari aspek tenaga manusianya.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Pengelolaan SKA tidak jarang menjadi ajang perebutan oleh berbagai aktor, khususnya antara masyarakat lokal dengan para pengusaha (korporasi) yang mendapatkan akses untuk mengelola kekayaan alam. Lokasi ibu kota negara juga menyebabkan adanya persaingan antar berbagai kelompok untuk menguasainya. Konflik yang terjadi dapat meningkatkan eskalasinya menjadi kerusuhan masal dan menghambat pembangunan di ibu kota negara yang baru. Di sisi lain, pembangunan IKN dilakukan di lahan dengan status areal penggunaan lain (APL) sehingga menyebabkan perubahan tata guna lahan, khususnya daerah tangkapan air.

4) Ideologi. Dalam konteks yang lebih spesifik mengenai

²⁰ Badan Pusat Statistik. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS

pertahanan dan keamanan IKN, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem pertahanan yang kuat. Era globalisasi dapat mengubah berbagai aspek kehidupan beserta nilai di dalamnya, namun dengan adanya Pancasila dapat menjadi titik tolak pertahanan negara untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI. Begitu halnya dengan IKN yang menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan visi kemerdekaan yang tertuang dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pembangunan IKN diharapkan dapat mendatangkan keadilan bagi seluruh rakyat.

5) Politik. Dalam konteks perpindahan Ibu Kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, terdapat aspek politik pemerintahan yang strategis yaitu pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis (Prayudi, 2020²¹). Prayudi juga menambahkan bahwa pemindahan IKN membutuhkan semacam kepemimpinan politik yang kuat karena pertimbangan bahwa tugas dan kewenangan mengelola IKN juga akan berhadapan dengan kepentingan politik organisasi politik kepartaian dan pebisnis yang juga memiliki kepentingannya sendiri. Dengan adanya pemindahan IKN diharapkan dapat membawa Indonesia untuk memiliki tatanan masyarakat baru yang salah satu karakteristiknya terdapat upaya untuk peningkatan pemerataan wilayah. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi tingkat kesenjangan simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek politik menjadi penting dalam pemindahan IKN karena adanya pemisahan antara pusat pemerintahan di Penajam Paser Utara dan pusat bisnis di Jakarta diharapkan dapat semakin memperkuat kepemimpinan politik di Indonesia.

6) Ekonomi. Pemindahan IKN yang memungkinkan adanya

²¹ Prayudi. (2020). Aspek Politik Pemerintahan dari rencana Pemindahan Ibu Kota Negara RI. Kajian Vol. 25, NO. 3, hal: 177-195

desentralisasi titik-titik pusat ekonomi juga dapat berkontribusi pada penurunan tingkat ketimpangan antara kelompok pendapatan tinggi dengan kelompok biasa yang berpendapatan rendah. Secara ideal, pertumbuhan ekonomi yang baik berkorelasi positif terhadap peningkatan persentase anggaran untuk pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sesuai dengan pemikiran kaum realis dalam kajian ilmu Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa militer yang kuat menghasilkan keseimbangan kekuasaan sehingga dapat berdampak pada situasi yang lebih kondusif bagi negara untuk meningkatkan perekonomian. Dalam kata lain, terdapat korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara aspek ekonomi dan militer, ketika ekonomi negara terus naik, militer juga dengan sendirinya akan makin bagus dan kuat.

7) Sosial Budaya. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan di IKN, dimana masyarakat setempat memiliki kebudayaan masih kental dengan suku asli dan mayoritas Dayak, pada umumnya suku tersebut bisa menerima heterogenan masyarakat yang ada disana. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya konflik antar golongan di wilayah Kalimantan sehingga lebih mudah memasukkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk masyarakat di IKN selanjutnya. Dengan demikian, aspek sosial budaya memiliki peran penting dalam pemindahan IKN karena menjamin adanya heterogenitas dalam kebhinekaan sehingga meminimalisir kesenjangan antar identitas sosial.

8) Pertahanan/Keamanan (Hankam). Dalam konteks Hankam, dapat dipahami bahwa ibu kota negara yang baru memiliki ancaman pertahanan yang berbeda dengan ibu kota negara yang sebelumnya. Realitas tersebut membawa urgensi tentang pentingnya melakukan kajian strategi pertahanan khusus untuk wilayah IKN guna menangkal ancaman dari dalam dan luar negara. Dalam situasi adanya potensi ancaman terhadap IKN, maka sudah sepatutnya Indonesia menyusun strategi pertahanan negara yang berlandaskan

perundang-undangan. Pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa pertahanan negara memerlukan kontribusi salah satunya dari komponen utama yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Postur pertahanan menjadi aspek penting yang perlu dipersiapkan sedini mungkin untuk menjamin keamanan IKN sebagai pusat pemerintahan yang rawan terhadap serangan musuh.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Sebelum membahas lebih mendalam tentang pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), terlebih dahulu perlu memahami permasalahan yang berpotensi terjadi di IKN dari dimensi pertahanan militer. Dalam serangan bersenjata (*armed attack*) ke suatu negara maka ibu kota menjadi simbol negara untuk diserang oleh pihak penyerang dan dipertahankan oleh pihak yang diserang. Ibu kota negara merupakan *Center of Gravity* (CoG) karena menjadi pusat kekuatan dan penentu kemenangan atau kekalahan suatu negara dalam perang.

Dengan kata lain, dikuasainya ibu kota menandakan kemenangan dari pihak yang melakukan penyerangan dan kekalahan dari pihak yang diserang. Oleh karena itu, setiap negara wajib mempertahankan dari sisi pertahanan militer terhadap ibu kota negara agar tidak mudah dikuasai apabila mendapat serangan²². IKN yang terletak di Kalimantan Timur juga rawan mendapat serangan atau agresi dari negara lain. Lokasi IKN yang terletak di garda depan pertahanan nasional. Melihat sejarah pada masa lalu, lokasi IKN adalah salah satu tempat yang disusupi atau diinfiltrasi oleh Jepang di masa Perang Pasifik, dalam hal ini Perang Dunia II²³.

Lokasi IKN juga memiliki batas wilayah darat secara langsung dengan Negara Malaysia dan berdekatan dengan ALKI II yang merupakan jalur yang digunakan oleh kapal militer maupun kapal dagang dunia. ALKI merupakan rute untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing. bebas. Di luar jalur ALKI pun tidak jarang dimanfaatkan untuk jalur penerbangan pesawat udara asing. Sementara itu, kekuatan udara Indonesia di wilayah tengah Indonesia yang didalamnya meliputi wilayah udara di atas ZEE di Laut Sulawesi merupakan wilayah tanggung jawab Koopsud II. Wilayah udara

²² Juwana, Hikmahanto. (2023). Pertahanan Nasional (Konteks Militer) Dalam Pemindahan IKN. Paparan ke Peserta PPSA XIV pada 4 Juli 2023.

²³ Widjajanto, Andi. (2023). Ibu Kota Nusantara. Lemhannas RI (tidak dipublikasikan).

bagian tengah memiliki dinamika ancaman pelanggaran udara yang cukup tinggi sehingga postur pertahanan udara harus dapat mengimbangi potensi ancaman yang sangat mungkin terjadi.

Dalam hal ini, postur pertahanan udara harus dibangun agar tangguh, efektif, dan efisien. Posisi IKN juga memunculkan potensi ancaman militer, baik dari wilayah darat, laut maupun udara. Untuk itu, faktor Astagatra agar menjadi pertimbangan dalam membangun postur pertahanan. Pada akhirnya, perlu upaya strategis untuk membangun postur pertahanan udara untuk pengamanan di wilayah IKN. Beberapa permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan hasil tinjauan peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, dan lingkungan strategis yang memengaruhi. Rangkuman dari studi kepustakaan tersebut digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan kajian pada Taskap ini.

13. Postur Pertahanan Udara Yang Tangguh, Efektif, dan Efisien

Pembahasan tentang postur pertahanan udara yang tangguh, efisien, dan efektif dalam Taskap ini, tidak dapat dipisahkan dari postur pertahanan militer (TNI). Pasal 11 Ayat (1) UU 34/2004 tentang TNI menyebutkan bahwa "Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata". Lebih lanjut, Pasal 11 Ayat (2) UU 34/2004 menyebutkan bahwa "Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 yang tertuang dalam Perpres 8/2021 menyebutkan bahwa kemampuan pertahanan dilakukan melalui pembangunan postur TNI yang mempunyai kemampuan dalam melakukan daya tangkal strategis dan memiliki mobilitas yang tinggi untuk diproyeksikan, baik di dalam maupun luar wilayah yurisdiksi NKRI dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang merupakan keterpaduan dari kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI. Demikian juga dengan postur pertahanan udara, juga meliputi keterpaduan dari ketiga elemen tersebut. Berikut adalah kondisi saat ini dari ketiga elemen postur pertahanan TNI dengan lebih menfokuskan pada pertahanan udara:

a. Kekuatan

Kekuatan militer di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia, dapat ditelusuri dari *Global Firepower* (GFP). GFP adalah organisasi yang berfokus dalam mengelola *database* dan menyediakan informasi tentang kekuatan militer dari 145 negara. Setiap tahunnya, GFP menyusun peringkat militer dunia dengan menggunakan suatu metodologi tertentu. Terdapat 60 faktor untuk menetapkan skor pada indeks kekuatan (*power indeks*). Faktor yang diukur meliputi: jumlah alutsista, kondisi keuangan negara, kekuatan logistik, dan kondisi geografi dari suatu negara. Berdasarkan laporan GFP tahun 2023, kekuatan militer Indonesia berada di ranking 13 dunia dengan indeks kekuatan 0,2221. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, peringkat Indonesia naik, dari ranking 15 (2022) menjadi ranking 13 (2023)²⁴.

Berdasarkan pengukuran GFP, meningkatnya skor kekuatan militer Indonesia didukung indeks kekuatan keuangan negara. Dalam hal ini, *Purchasing Power Parity* (PPP) Indonesia masuk dalam kategori sepuluh besar negara di dunia. Nilai PPP Indonesia sebesar \$ 3.130.470.000.000 USD, berada pada urutan ke-7 dari 145 negara. Dari sisi kekuatan personel, jumlah anggota militer aktif sebanyak 415.000 orang, terdiri dari TNI AD sebanyak 300.000 personel, TNI AL sebanyak 75.000 personel, dan TNI AU sebanyak 40.000 personel. Sementara, dari sisi kekuatan atau alutsistanya, TNI AU memiliki 466 unit pesawat terdiri dari pesawat tempur, pesawat transport, dan helikopter. Kekuatan TNI AD memiliki 314 unit tank, kendaraan tempur lapis baja sebanyak 1.430 unit, roket 63, senjata artileri 153 unit, dan meriam tembak 414 unit. Selanjutnya, TNI AL 324 unit kekuatan, yaitu kapal perang *frigates*, *corvettes*, *submarines*, *patrol vessels*, dan *mine warfare*²⁵.

Jika lebih spesifik pada kekuatan pertahanan udara yang merupakan bagian dari kekuatan pertahanan TNI, meliputi aspek organisasi, aspek alat utama sistem senjata dan pendukungnya, serta aspek pangkalan. Dalam

²⁴Indonesia Defense. (2023). Naik, Militer Indonesia Tempati Peringkat 13 Terbaik Dunia. <https://indonesiadefense.com/naik-militer-indonesia-tempati-peringkat-13-terbaik-dunia/>

²⁵detiksulsel. (2023). 100 Ranking Militer Dunia 2023, Indonesia Urutan Berapa? <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6503707/100-ranking-militer-dunia-2023-indonesia-urutan-berapa>.

Taskap ini, fokus pembahasannya pada pengamanan di wilayah udara IKN sehingga dibatasi pada kekuatan pertahanan udara pada aspek kekuatan tempur dan Radar untuk mendeteksi jarak, arah, serta kecepatan benda yang bergerak sebagai alat pertahanan udara (Hanud).

b. Kemampuan

Unsur kemampuan TNI maupun TNI AU tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan, dimana kekuatan yang tinggi juga diikuti oleh kemampuan yang tinggi pula. Namun, secara spesifik kemampuan TNI AU sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor 545/V/2019 diarahkan kepada 12 macam kemampuan sebagai berikut :

- 
- 1) Diplomasi,
 - 2) Intelijen,
 - 3) Penyerangan,
 - 4) Pertahanan,
 - 5) Khusus,
 - 6) Pengamanan,
 - 7) Dukungan,
 - 8) Integrasi komunikasi dan informasi,
 - 9) Siber,
 - 10) Perang elektronik,
 - 11) Pemeliharaan, dan
 - 12) Pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Berdasar konsep kemampuan tersebut, maka pengamanan wilayah udara di IKN merupakan kemampuan TNI AU yang keenam yaitu kemampuan pengamanan. Kemampuan pengamanan dilakukan di masa damai, namun dapat menjadi kemampuan pertahanan dan kemampuan penyerangan pada masa konflik. Dalam menghadapi ancaman atau serangan musuh maka kemampuan yang lain akan dikedepankan, seperti: Kemampuan penyerangan, kemampuan pertahanan, kemampuan perang elektronik, dan lain-lain. Dalam Taskap ini, elemen kemampuan yang dibahas dibatasi pada kemampuan pesawat tempur dan Radar sebagai alat

(*means*) dalam mengamankan wilayah udara IKN. Sementara untuk kemampuan peluru kendali (Rudal), akan digunakan sebagai bahan tambahan dalam membahas postur pertahanan udara yang ideal, sekaligus perlu dibangun kekuatannya.

c. Penggelaran Kekuatan

Terkait dengan penggelaran kekuatan, jika merujuk pada teori perencanaan postur kekuatan dan kemampuan yang disebutkan oleh Bartlett bahwa perencanaan pola gelar kekuatan dan kemampuan militer menentukan 4 (empat) kemampuan tempur, terdiri dari: kesiapan, logistik, modernisasi, dan struktur kekuatan. Oleh karena itu, pola gelar kekuatan matra udara harus menyesuaikan dengan ancaman yang ada saat ini dan ancaman yang kemungkinan akan terjadi di masa depan dengan mempertimbangkan modernisasi alutsista. Pola gelar kekuatan militer tersebut nantinya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar mampu menjaga pertahanan dan keamanan IKN.

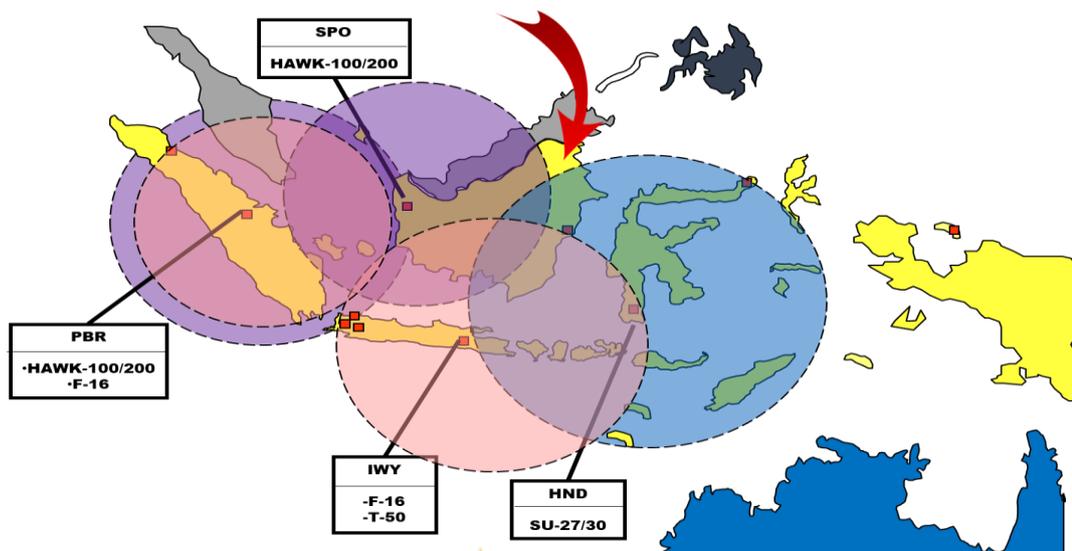
Dalam konsep postur pertahanan, penggelaran dapat diartikan sebagai penempatan satuan-satuan militer dalam suatu wilayah geografis. Selain berhubungan dengan geografis, penggelaran juga berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan Alutsista. Penggelaran terkait dengan kekuatan dan kemampuan Alutsista yang merupakan sarannya (*means*), maka penggelaran sering disebut sebagai cara atau strategi (*ways*) penggelaran. Penggelaran dalam Taskap ini dibatasi pada penggelaran Radar Hanud dan pesawat tempur yang merupakan Alutsista pokok yang terkait langsung dengan tugas mengamankan wilayah udara IKN sebagai tujuannya (*ends*). Untuk penggelaran Rudal, tetap diperlukan sebagai tambahan kekuatan dalam mengamankan wilayah udara IKN.

Dari ketiga elemen postur tersebut, maka kekuatan dan kemampuan pertahanan suatu negara dapat dengan mudah ditelusuri dari laporan GFP, sementara untuk penggelarannya lebih sulit ditelusuri karena kekuatan pertahanan (alutsista militer) dapat bersifat *mobile*. Pergeseran kekuatan yang disertai dengan kemampuan alutsista/personel, di TNI Angkatan Udara sering dilakukan yang

dikenal sebagai *squadron move* (perpindahan skadron). Terlebih lagi, beberapa pangkalan udara memang telah dipersiapkan apabila sesewaktu diperlukan dalam mendukung operasi udara. Konsep penyiapan pangkalan operasi udara ini dikenal sebagai *Bare Base Concept* yaitu menyiapkan pangkalan udara meskipun hanya memiliki fasilitas dan pengawakan minimal, jika sesewaktu diperlukan dapat ditingkatkan secara cepat sehingga mampu mendukung operasi udara.

Penggelaran kekuatan TNI AU merupakan wujud dan refleksi dari strategi TNI AU dalam pelaksanaan tugas pokok TNI AU yang disusun berdasarkan aspek geografi dan penyelenggaraan komando dan kendali. Penggelaran kekuatan TNI AU merupakan komponen postur TNI AU yang mencerminkan strategi TNI AU dalam mengoptimalkan aspek kekuatan dan kemampuan serta potensi penggunaan kekuatan TNI AU. Adanya perubahan kebijakan untuk memindah ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur tentunya akan sangat berpengaruh besar bagi TNI AU, terutama dalam penggelaran kekuatan yang sudah ada saat ini dan juga untuk ke depannya. Berikut ini adalah uraian tentang penggelaran unsur pertahanan udara yang meliputi unsur tempur sergap, unsur radar, dan unsur rudal:

- a. **Unsur Tempur Sergap.** Unsur tempur sergap (TS) merupakan unsur yang keberadaannya sangat vital dalam operasi pertahanan udara, baik sebagai alat identifikasi visual maupun sebagai alat penindak aktif terhadap sasaran udara. Penggelaran unsur TS pada pangkalan udara induk yaitu di Lanud Iswahjudi (IWJ) Madiun, Lanud Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru, Lanud Supadio (SPO) Pontianak, dan Lanud Hasanuddin (HND) Makassar. Posisi gelar unsur TS yang terdekat dengan IKN adalah unsur SU 27/30 Skadron Udara 11 di Lanud HND Makassar yang berjarak lebih kurang 175 NM dari Balikpapan. *Radius Of Action* (ROA) unsur TS dari pangkalan masing-masing belum mampu untuk mengkover wilayah udara IKN, khususnya terhadap sasaran yang datang dari arah utara (Gambar 1).

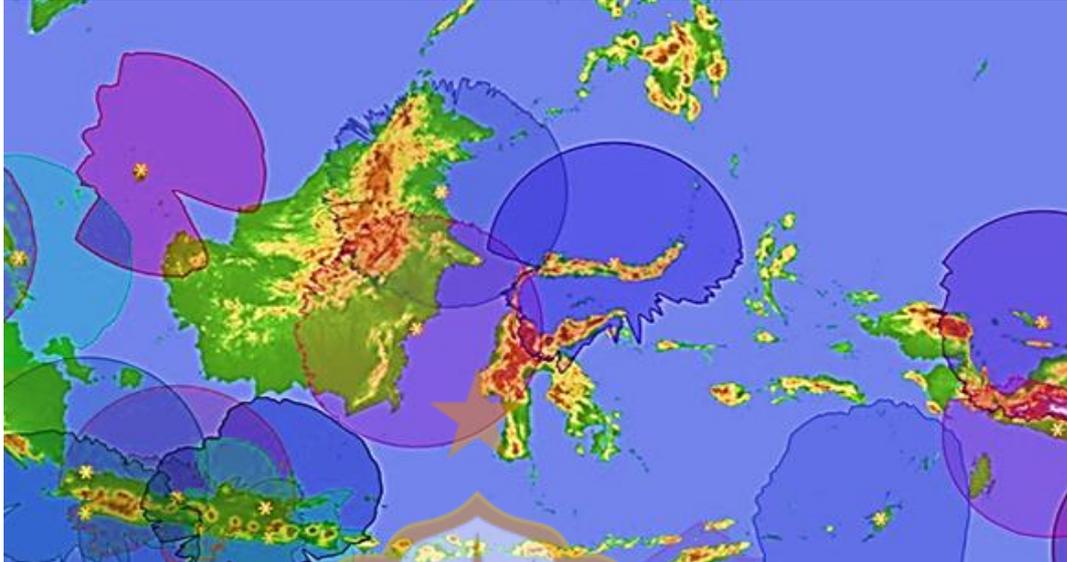


Gambar 1. RoA Unsur TS dari Lanud IWJ, RSN, SPO dan HND

b. **Unsur Radar.** Satuan Radar (Satrad) yang sudah tergelar saat ini tersebar di 4 Komando Sektor (Kosek), yaitu:

- 1) Komando Sektor I/Medan meliputi: Satrad 231 (Lhokseumawe), Satrad 232 (Dumai), Satrad 233 (Sabang), dan Satrad 234 (Sibolga).
- 2) Komando Sektor IKN/Jakarta meliputi: Satrad 211 (Tanjung Kait), Satrad 212 (Ranai), Satrad 213 (Tanjung Pinang), Satrad 214 (Tegal), Satrad 215 (Congot), Satrad 216 (Cibalimbing), dan Satrad 111 (Teluk Naga).
- 3) Komando Sektor II/Makassar meliputi: Satrad 221 (Ngliyep), Satrad 222 (Ploso), Satrad 223 (Balikpapan), Satrad 224 (Kwandang), dan Satrad 225 (Tarakan).
- 4) Komando Sektor III/Biak meliputi: Satrad 241 (Buraen), Satrad 242 (Tanjung Warari), Satrad 243 (Timika), Satrad 244 (Merauke), dan Satrad 245 (Saumlaki).

Dari 20 Satrad tersebut, terdapat 3 Satrad yang mampu mengkover wilayah udara di sekitar IKN (Gambar 2), yaitu: Satrad 225 (Tarakan), Satrad 223 (Balikpapan), dan Satrad 224 (Kwandang, Gorontalo Utara).



Gambar 2. Ilustrasi Penggelaran Satuan Radar di Indonesia

c. **Unsur Rudal.** Saat ini belum ada unsur peluru kendali (Rudal) pertahanan udara yang digelar di wilayah Kalimantan Timur sebagai daerah yang akan dijadikan sebagai Ibu kota negara baru. Indonesia baru memiliki satu satuan rudal, yaitu Satuan Rudal (Satrudal) 111 di Teluk Naga, Tangerang menjadi pusat sistem hanud NASAMS (*Norwegian Advanced Surface to Air Missile*). Satrudal 111 dimaksudkan sebagai kekuatan pertahanan udara dalam menghadapi potensi serangan musuh, khususnya di wilayah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan: 1) *Radius of Action* (RoA) unsur TS dari empat pangkalan udara induk (IWJ, RSN, SPO, dan HND) belum optimal dalam mengkover wilayah udara IKN, khususnya terhadap sasaran yang datang dari arah utara, 2) Dari sisi unsur radar, sudah ada tiga Satrad yang berada di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang mampu mengkover wilayah udara IKN yaitu Satrad 223 (Balikpapan), Satrad 225 (Tarakan), dan Satrad 224 (Kwandang, Gorontalo Utara), dan 3) Sampai saat ini, baru ada satu Satrudal 111 di Teluk Naga, Tangerang yang disiagakan untuk mengamankan wilayah ibu kota

Jakarta. Dengan demikian, postur pertahanan udara yang tangguh, efektif, dan efisien masih perlu dibangun atau dikembangkan agar mampu menjaga keamanan wilayah di IKN. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya strategis untuk membangun postur pertahanan udara guna pengamanan wilayah IKN. Namun, sebelum membahas lebih jauh terkait beberapa upaya strategis tersebut, perlu memahami proyeksi ancaman militer di IKN dan mempertimbangkan faktor Astragatra yang terjadi di IKN.

14. Proyeksi Ancaman Militer di Ibu Kota Nusantara

Ibu kota negara adalah simbol bagi suatu negara guna menunjukkan jati diri dan harga diri bangsa dan negara yang memiliki peran sentral bagi pemimpin negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Selain itu, ibu kota mencerminkan kekhasan sebagai ciri bagi suatu bangsa, seperti keberagaman suku bangsa, kebudayaan, agama, dan arah politik. Ditinjau dari perspektif hubungan internasional, ibu kota juga merupakan gerbang utama dari suatu negara. Sebagai tempat kedudukan bagi para wakil diplomatik negara lain, berkumpulnya organisasi internasional, dan menjadi miniatur bagi suatu negara. Melihat peran strategis tersebut, pembentukan ibu kota negara yang baru telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pertimbangan dalam memindahkan ibu kota negara karena posisi Jakarta yang terletak di bagian barat Indonesia sehingga lebih mempertajam tingginya disparitas pembangunan dan ekonomi antar wilayah dalam skala nasional. Pertimbangan lainnya, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan seperti kejadian banjir tahunan dan kepadatan lalu lintas. Mencermati kompleksitas permasalahan di kota Jakarta tersebut memunculkan wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Wacana inipun telah digulirkan oleh beberapa Presiden RI sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, sehingga hal ini menjadikan perhatian bagi semua pihak termasuk TNI Angkatan Udara yang merupakan bagian dari TNI sebagai alat pertahanan negara.

Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa telah memberi keputusan tentang perpindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tepatnya di

Kecamatan Cipaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pernyataan Presiden RI tersebut telah didukung dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang ibu kota negara (UU 3/2022) yang selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara berarti pemindahan lokasi/tempat sehingga berdampak pada potensi ancaman yang dapat mengancam ibu kota negara. Berdasarkan tinjauan Kementerian Pertahanan, aspek yang memengaruhi ibu kota negara adalah aspek pertahanan dan keamanan, sehingga kota yang nantinya menjadi calon pengganti Ibu kota negara harus memenuhi sebagai tempat terlindung (perimeter) dari dimensi pertahanan dan keamanan. Perimeter tersebut mencakup: mampu untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap penduduknya. Di samping itu juga harus mampu meminimalisasi tingkat kerentanan negara (*to minimize vulnerability of state*) dan mampu mendukung penyelesaian berbagai permasalahan regional maupun internasional.

Dalam hal ini, TNI dituntut untuk mampu menghadapi berbagai proyeksi ancaman di ibu kota baru. Makna kata "Proyeksi" (*projection*) terkait dengan keadaan masa depan, baik kemungkinan maupun perkiraan, dengan mempertimbangkan data yang ada saat ini. Oleh karena itu, proyeksi ancaman dijabarkan menjadi kemungkinan ancaman dan prediksi ancaman. Kemungkinan (*possibility*) adalah keadaan yang mungkin atau keadaan yang memungkinkan sesuatu terjadi. Prediksi (*prediction*) adalah perkiraan tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi pada masa mendatang, didasarkan pada informasi yang lalu dan perkiraan saat ini yang diyakini. Berikut ini adalah berbagai proyeksi ancaman militer yang terdiri dari kemungkinan ancaman dan prediksi ancaman di IKN:

- a. **Kemungkinan Ancaman.** Kemungkinan ancaman, arah ancaman, dan bentuk ancaman udara dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Kemungkinan Ancaman Militer. Ancaman dapat bersumber dari darat, laut, dan udara. Dalam hal ini, ancaman militer yang berasal dari aktor non negara (*non state actors*).

2) Arah Ancaman. Arah ancaman yang memungkinkan datangnya dari arah utara dan timur wilayah Kalimantan Timur.

3) Bentuk Ancaman Udara. Bentuk ancaman udara dapat berupa pesawat udara berawak maupun tidak berawak dan benda lainnya yang menggunakan wahana udara yang kemungkinan datang dari arah utara, barat maupun timur pada jalur ALKI II.

b. **Prediksi Ancaman.** Prediksi ancaman yang mungkin terjadi dengan mencermati sumber dan bentuk ancaman di wilayah NKRI, tidak terkecuali di Kalimantan Timur pada masa depan, antara lain:

1) *Limited War.* Perang terbatas atau *limited war* adalah agresi militer dari negara lain di sebagian wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dalam konteks eksploitasi asing dan perebutan sumber daya alam, termasuk sengketa di wilayah perbatasan.

2) Intervensi Militer Asing di Wilayah NKRI. Hukum Internasional yang berlaku saat ini mendorong semua negara agar saling menghormati kedaulatan masing-masing dan tidak membenarkan tindakan intervensi suatu negara atau sekelompok negara ke wilayah sebuah negara yang berdaulat. Apabila sebuah negara dianggap gagal melindungi keselamatan rakyatnya sehingga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara masif serta menimbulkan potensi terganggunya stabilitas kawasan yang semakin meluas. Apabila situasi tersebut dianggap telah terpenuhi, sebuah/sekelompok negara dapat dibenarkan melaksanakan intervensi menggunakan dalih merasa ikut memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa manusia (terkhusus bagi warganegaranya) dan menegakkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM atau "*Responsibility to Protect*" (R to P).

3) Intervensi Kekuatan Asing. Campur tangan kekuatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gerakan separatisme di Indonesia, dalam bentuk politik/diplomasi, logistik, intelijen, dan persenjataan yang kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk ancaman perang proksi (*proxy war*).

4) Degradasi Moral. Upaya menghancurkan daya saing bangsa melalui degradasi moral dan mental komponen bangsa yang memanfaatkan kebebasan akses komunikasi dan penggunaan narkoba.

5) Terorisme. Terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Kegiatan terorisme dapat mengganggu kondisi stabilitas keamanan bagi sebuah negara, bahkan dalam eskalasi tertentu dapat mengancam stabilitas regional maupun global. Berbagai ancaman yang dilakukan oleh para teroris tersebut, sudah selayaknya dipertimbangkan sebagai *proxy war* dalam konteks terorisme. Kelompok teroris tidak jarang dimanfaatkan oleh kelompok lain dan digunakan sebagai alasan pembenaran (*justification*) dalam melakukan intervensi ke negara lain melalui alasan R to P (*Responsibility to Protect*) terhadap warga negaranya maupun kepentingan nasionalnya.

6) Narkoba. Narkoba dan obat/bahan berbahaya yang di Indonesia juga dikenal sebagai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada dasarnya merupakan obat bius untuk kepentingan medis. Namun penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi muda yang merupakan sumber daya manusia untuk membangun bangsa di masa depan. Dengan hancurnya generasi muda suatu bangsa maka masa depan negara tersebut akan hancur sehingga mudah dimanfaatkan dan dikuasai bangsa lain.

7) Perebutan Sumber Daya Alam. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dunia dengan ketersediaan energi, pangan dan air

bersih diperkirakan akan menimbulkan potensi konflik baru di dunia. Diperkirakan dunia akan sampai pada titik dimana jumlah penduduknya melebihi kapasitas daya tampung bumi. Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tidak dalam satu garis berpotensi mengalami perbedaan penafsiran oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya menimbulkan sengketa di daerah tersebut.

8) Pelanggaran Wilayah Udara. Ancaman pelanggaran wilayah udara yurisdiksi nasional akan terus terjadi di selatan Pulau Jawa sampai dengan NTT, Laut Jawa, Selat Karimata, Perairan Natuna, Selat Malaka, Perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafura dan sekitar ALKI. Adanya kebijakan ASEAN dalam meliberalisasikan wilayah udara (*Open Sky Policy*) yang sudah berlaku sejak Desember 2015, di samping memiliki nilai ekonomis yang besar, namun memiliki potensi pelanggaran wilayah udara. Selain itu, masih terdapat sebagian wilayah udara yurisdiksi nasional yang masih dalam pengaturan dan kontrol udara (FIR) Singapura menjadi kendala bagi TNI AU dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar wilayah kedaulatan udara nasional. Pelanggaran wilayah udara dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

a) Memanfaatkan jalur udara ALKI dan jalur udara internasional yang dapat mengarah kepada pelanggaran kedaulatan dan kegiatan ilegal lainnya yang dilakukan oleh pesawat berawak maupun tidak berawak (UAV) yang memiliki keunggulan dalam pengamatan (*observation*), pengawasan (*surveillance*), dan pengintaian (*reconnaissance*).

b) Melakukan penerbangan di wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin atau melakukan kegiatan penerbangan tidak sesuai dengan rute yang diizinkan, terutama pada hari-hari libur dan *event-event* nasional lainnya.

- c) Memanfaatkan celah-celah kelemahan yang belum tertuang dalam peraturan/perundang-undangan, termasuk jumlah serta disposisi dan dislokasi pesawat-pesawat tempur TNI AU.
- d) Memanfaatkan wilayah yang tidak memiliki sinyal atau *blank spot* sehingga pesawatnya tidak terdeteksi oleh radar Hanud maupun radar sipil.

Kemungkinan ancaman maupun prediksi ancaman di IKN tersebut semakin menegaskan teori ancaman yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt bahwa ancaman negara dapat bersumber dari kekuatan militer dan nonmiliter yang dapat membahayakan individu hingga negara. Lebih spesifik, pandangan Indonesia yang tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, ancaman adalah semua usaha maupun kegiatan, baik dari luar ataupun dari dalam negeri, yang dianggap membahayakan atau mengancam kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah negara.



Gambar 3. Peta Situasi Ancaman Pelanggaran Wilayah Udara

Pertahanan udara pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara dan penegakan hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional dari setiap ancaman udara. Kegiatan tersebut

dilakukan secara terpadu yang melibatkan unsur-unsur TNI maupun sipil yang memiliki kemampuan hanud. Ancaman udara yang sewaktu-waktu dapat muncul mengharuskan operasi hanud dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun sehingga mampu mendeteksi sedini mungkin terhadap setiap kemungkinan ancaman udara. Agar ancaman udara dapat dihancurkan sebelum mencapai sasaran maka sistem pertahanan udara harus dapat menjangkau sampai ke luar wilayah udara yurisdiksi nasional. Berdasarkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dan gelar kekuatan TNI AU yang sudah ada dan yang sesuai dengan Renstra maka pertahanan wilayah udara di IKN belum memadai karena belum memiliki satuan dan alutsista yang mampu menangkal setiap kemungkinan ancaman yang akan terjadi.

Sementara itu, ditinjau dari sisi pengamanan wilayah udara melalui operasi penegakan hukum (Opsgakkum) juga masih perlu dioptimalkan. Opsgakkum bertujuan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara nasional yang aman dan bebas dari pelanggaran navigasi, ancaman kekerasan, dan pelanggaran hukum di wilayah udara. Didalamnya termasuk pelanggaran di kawasan wilayah udara terlarang dan wilayah udara terbatas, zona ADIZ, pelanggaran ruang udara di atas ALKI, dan ancaman benda ruang angkasa yang masuk ke orbit bumi yang mengarah ke Indonesia, serta wilayah tertentu baik berupa bandar udara yang digunakan bersama, dan pangkalan udara yang digunakan bersama yang berpotensi terjadi ancaman. Ditinjau dari hal-hal tersebut, maka wilayah udara di Kalimantan belum dapat dilaksanakan pengamanan secara maksimal karena keterbatasan gelar dan kekuatan TNI AU sehingga memerlukan beberapa perbaikan penataan gelar kekuatan dan penambahan alutsista yang dimiliki.

15. Pengaruh Faktor Astagatra Dalam Membangun Postur pertahanan

Dalam membangun postur pertahanan guna mengamankan wilayah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini dipengaruhi oleh faktor Astagatra yang meliputi: posisi geografi, kondisi demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam membangun postur pertahanan yang handal

sekaligus mampu mengamankan ibu kota negara yang baru, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Posisi Geografi.** Ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru tentunya sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang oleh pihak-pihak terkait. Posisi Kalimantan Timur yang berada dalam wilayah pemantauan udara dari Satrad 223 (Balikpapan), Satrad 225 (Tarakan), dan Satrad 224 (Kwandang, Gorontalo Utara) merupakan posisi yang strategis dan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan:

- 1) Perbatasan Darat. Disebelah utara Kalimantan berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia yang membentang dari barat sampai ke timur. Malaysia sebagai negara tetangga sudah menggelar kekuatan darat, laut dan udara di Kalimantan bagian utara seperti di Labuan dan Kuching.
- 2) Laut Sulawesi. Wilayah Laut Sulawesi yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Filipina yang situasi keamanannya akhir-akhir ini cukup rawan dengan seringnya terjadi perompakan dan tindak kejahatan lainnya.
- 3) ALKI II. Di sebelah timur Kalimantan terbentang jalur ALKI II dari utara yaitu Laut Sulawesi sampai ke selatan Selat Lombok. Jalur ALKI merupakan jalur yang disiapkan sebagai konsekuensi diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana jalur tersebut bebas digunakan oleh negara manapun dengan aturan-aturan yang sudah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia.

b. **Kondisi Demografi.** Faktor demografi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan postur pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terutama dalam konteks Indonesia yang sedang membangun ibu kota baru. Beberapa pengaruh penting yang terkait dengan kondisi demografi adalah :

1) Jumlah dan kualitas SDM di IKN Kalimantan Timur akan menjadi faktor kunci dalam pembangunan postur pertahanan. Jumlah penduduk yang mencukupi dapat memberikan basis potensial bagi rekrutmen personel militer dan sipil yang terlibat dalam industri pertahanan. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan akan menentukan sejauh mana SDM tersebut dapat berkontribusi secara efektif dalam sektor pertahanan.

2) Jumlah penduduk yang mencukupi dapat memberikan lebih banyak tenaga kerja untuk mendukung industri pertahanan dan proyek-proyek strategis di IKN. Hal ini akan membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat kapabilitas pertahanan nasional.

3) Jumlah penduduk di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 adalah 3.766.039 jiwa sedangkan proyeksi jumlah penduduk 2023 sebesar 3.795.636 jiwa²⁶. Sampai saat ini, sebaran penduduk yang berdomisili di Wilayah Kalimantan Timur sebagian besar bermukim di perkotaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Khusus di daerah perbatasan Kalimantan, jumlah penduduk masih jarang yaitu ± 18 jiwa/Km² sehingga hal ini kurang menguntungkan bila ditinjau dari aspek keamanan. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini, ditinjau dari aspek keamanan merupakan daerah yang rawan disusupi oleh berbagai kelompok kriminal, seperti terorisme maupun penyelundupan narkoba.

c. **Sumber Kekayaan Alam.** Pengaruh faktor sumber kekayaan alam menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan postur pertahanan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap strategi pertahanan nasional dan keamanan wilayah. Berikut

²⁶ <https://kaltim.bps.go.id/quickMap.html>

adalah beberapa pengaruh faktor sumber kekayaan alam yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan postur pertahanan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur antara lain :

1) Sumber kekayaan alam seperti minyak, gas, batu bara, dan komoditas lainnya dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah dan nasional. Pendapatan tambahan ini dapat dialokasikan untuk mendanai pembangunan postur pertahanan dan meningkatkan anggaran militer. Dengan akses ke sumber daya alam yang melimpah, IKN Kalimantan Timur memiliki lebih banyak sumber daya keuangan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan militer.

2) Kekayaan alam yang melimpah juga menjadi daya tarik bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk ancaman teroris atau kelompok bersenjata lainnya yang ingin menguasai sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pembangunan postur pertahanan di IKN dan Kalimantan Timur harus memperhatikan aspek pengamanan sumber daya alam agar dapat melindungi aset nasional dan wilayah yang strategis.

3) Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah penting dalam pembangunan postur pertahanan. Kegiatan eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam yang dapat mengganggu kesiapan pertahanan wilayah.

d. **Ideologi.** Faktor ideologi juga memainkan peran penting dalam pembangunan postur pertahanan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Beberapa aspek ideologi yang dapat memengaruhi pembangunan postur pertahanan tersebut meliputi:

1) Pada umumnya pengamalan Ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah

berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari segi kehidupan beragama maupun dalam kegiatan sosial. Namun masih terdapat sekelompok Ormas/Kelompok Masyarakat tertentu yang menuntut berdirinya khilafah seperti yang disuarakan oleh HTI maupun upaya eks komunis yang berusaha menggalang massa dan menciptakan opini untuk kepentingan organisasinya.

2) Jaringan terorisme masih tumbuh dan berkembang di wilayah Kalimantan Timur dengan sel-sel tidur yang sewaktu-waktu muncul melakukan aksi terorisme, hal tersebut ditandai dengan adanya kelompok-kelompok radikal eks narapidana teroris yang berada di wilayah Kalimantan Timur yang pernah melakukan aksi peledakan bom molotov di gereja Oikumene saat pelaksanaan perayaan Natal bersama tahun 2016, dimana pelakunya adalah Napi teroris yang juga tersangka kasus bom buku di Jakarta serta ditangkapnya 2 orang teroris jaringan JAD pada bulan Agustus 2018 di wilayah Penajam Paser Utara dan Kabupaten Pasir.

3) Kalimantan Timur memiliki beragam kelompok etnis yang tinggal di wilayah tersebut. Pertentangan etnis atau kesenjangan sosial dapat memicu ketegangan dan konflik di antara masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempromosikan kerukunan antar etnis dan menghindari perpecahan sosial yang berpotensi mengancam stabilitas wilayah.

e. **Politik.** Pembangunan postur pertahanan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memiliki banyak aspek politik yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilannya. Beberapa aspek politik yang memengaruhi pembangunan postur pertahanan tersebut adalah:

1) Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berbatasan dengan negara-negara tetangga, sehingga hubungan politik dengan negara-negara ini sangat penting. Pembangunan postur pertahanan harus mempertimbangkan faktor-faktor diplomasi dan hubungan bilateral

agar tidak menimbulkan ketegangan atau konflik potensial dengan negara tetangga.

2) Meningkatnya suhu politik menjelang pemilihan presiden dan legislatif 2024 yang diwarnai dengan terbentuknya tim-tim pemenangan maupun relawan dan simpatisan oleh masing-masing Capres/Cawapres dan Caleg di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Masing-masing pendukung berusaha menjagokan calonnya dan tidak sedikit yang berusaha menjatuhkan calon lainnya. Konflik politik diperkirakan akan semakin memanas memasuki tahun 2024. Di sisi lain, pembangunan IKN dapat menjadi isu pro dan kontra bagi para capres maupun caleg.

2) Pemerintah daerah di Kalimantan Timur akan memainkan peran penting dalam pembangunan postur pertahanan Ibu Kota Nusantara. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membantu memastikan implementasi yang efektif dari rencana pertahanan dan memaksimalkan dukungan lokal dalam upaya pertahanan.

f. **Ekonomi.** Aspek ekonomi memiliki peran krusial dalam pembangunan postur pertahanan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi yang dapat memengaruhi pembangunan postur pertahanan tersebut:

1) Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka stabilitas ekonomi adalah bagaimana agar arus distribusi bahan pangan dapat berjalan dengan lancar, karena sarana perhubungan masih terbatas serta pemanfaatan lahan yang ada di wilayah pedalaman untuk dijadikan sektor pertanian dapat menciptakan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

2) Keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan postur pertahanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Melibatkan perusahaan-perusahaan lokal atau nasional dalam proyek-proyek pertahanan, misalnya dalam pengadaan peralatan militer, dapat membantu meningkatkan kapabilitas dan efisiensi angkatan bersenjata.

3) Pengembangan industri pertahanan lokal di wilayah tersebut dapat menjadi faktor penting dalam pembangunan postur pertahanan. Memiliki industri pertahanan yang kuat di wilayah Kalimantan Timur dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan dan membuka peluang kerja serta meningkatkan ekonomi lokal.

g. **Sosial-Budaya.** Aspek sosial budaya memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan postur pertahanan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Berikut adalah beberapa aspek sosial budaya yang dapat memengaruhi pembangunan postur pertahanan tersebut:

1) Kesadaran akan pentingnya keamanan nasional dan peran pertahanan dalam melindungi wilayah dan masyarakat menjadi faktor utama dalam pembangunan postur pertahanan. Penguatan kesadaran akan ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar negeri akan membantu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pertahanan.

2) Lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, memegang peran penting dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pertahanan nasional. Mendukung program-program pendidikan yang memperkuat kesadaran bela negara akan menciptakan basis yang kuat untuk pembangunan postur pertahanan yang berkelanjutan.

3) Peran perempuan dalam pembangunan postur pertahanan juga penting untuk diperhatikan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pertahanan, seperti sebagai personel militer,

peneliti pertahanan, atau pengambil kebijakan, dapat membantu memperkuat upaya pertahanan nasional secara menyeluruh.

h. **Pertahanan.** Aspek pertahanan keamanan memiliki peran sentral dalam pembangunan postur pertahanan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Berikut adalah beberapa aspek pertahanan keamanan yang memengaruhi pembangunan postur pertahanan tersebut:

- 1) Identifikasi dan penilaian terhadap berbagai ancaman keamanan yang mungkin dihadapi wilayah Kalimantan Timur akan menjadi dasar untuk merumuskan rencana pertahanan yang tepat. Ancaman dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk ancaman militer, ancaman non-militer seperti terorisme, perdagangan ilegal, konflik etnis, dan gangguan siber.
- 2) Pembangunan infrastruktur pertahanan yang kuat dan canggih akan menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman keamanan. Ini termasuk pembangunan pangkalan militer, sistem pertahanan udara, sistem radar, dan fasilitas pertahanan lainnya yang mendukung mobilitas dan efisiensi pasukan pertahanan.
- 3) Kalimantan Timur berbatasan dengan negara-negara tetangga, oleh karena itu, kerjasama regional dan internasional dalam bidang pertahanan sangat penting. Diplomasi dan kerjasama dengan negara-negara tetangga dapat membantu membangun kepercayaan, meningkatkan keamanan bersama, dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut.

16. Upaya Strategis Untuk Membangun Postur Pertahanan Udara di Wilayah IKN

UU 43/2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah NKRI meliputi: wilayah darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, serta seluruh kekayaan di dalamnya. Wilayah IKN

meliputi wilayah daratan dengan luas wilayah berkisar 256.142 hektar serta wilayah perairan laut dengan luas berkisar 68.189 hektar. Demikian juga dengan PP 13/2017 (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) pada Pasal 75 mengatur bahwa “Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan; pertubuhan ekonomi; sosial dan budaya; pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup”.

IKN akan menjadi pusat pemerintahan, maka TNI khususnya TNI Angkatan Udara memiliki tugas untuk melindungi IKN dari segala potensi ancaman di wilayah udara. Oleh karenanya dibutuhkan postur pertahanan udara untuk melindungi ibu kota negara baru. PP 4/2018 (Pengamanan Wilayah Udara), pada bagian penjelasan untuk pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara adalah pengaturan untuk kepentingan tertentu seperti menetapkan daerah atau kawasan udara terlarang (*prohibited area*), kawasan udara terbatas (*restricted area*), dan kawasan untuk melakukan identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ ADIZ*)”.

Pelanggaran wilayah udara merupakan ancaman keamanan wilayah udara di IKN yang berpotensi terjadi karena letak IKN sangat dekat dengan jalur ALKI II yang merupakan jalur perdagangan dan pelayaran internasional yang bernilai strategis. Data Pelanggaran Wilayah Udara di Kosek IKN tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut: dari 10 pelanggaran wilayah udara pada 2021, 4 diantaranya merupakan Lasa X (tidak teridentifikasi). Pada 2022, terdapat 22 pelanggaran wilayah udara dikategorikan sebagai Non FC (*non flight clearance*) atau tanpa izin terbang, sedangkan pada 2023 (sampai 18 Mei 2023) telah terjadi 22 Lasa T atau tidak memiliki izin. Ditinjau dari asal negara maka negara pelanggar didominasi oleh Amerika sebanyak 19 kejadian dari 46 pelanggaran.

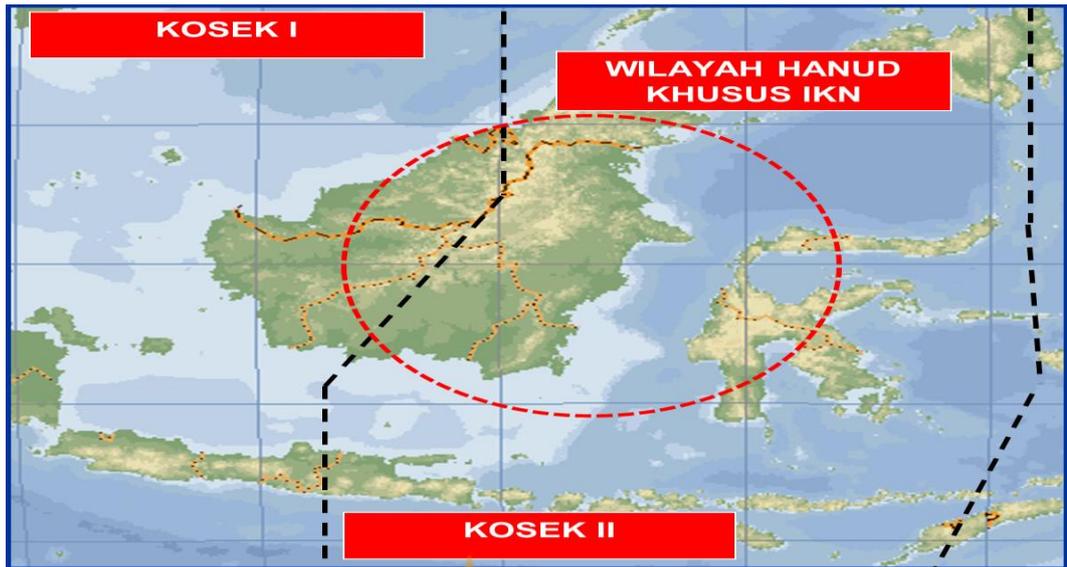
Postur pertahanan udara merupakan penjabaran dari postur TNI AU, dan postur TNI AU adalah penjabaran dari dan postur pertahanan TNI yang dijabarkan dari postur pertahanan negara. Perencanaan postur pertahanan udara, disusun oleh staf perencanaan dan dusulkan kepada komando atasan secara bertingkat (*bottom up*). Namun setelah postur pertahanan ditetapkan oleh Menteri

Pertahanan sebagai dokumen Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Haneg), selanjutnya penetapan Renstra Mabes TNI ditetapkan secara *top down*.

Postur pertahanan udara tertuang dalam Peraturan Kasau Nomor 213 tentang Rencana Strategis TNI AU tahun 2020-2024. Sebagaimana Perkasau tersebut postur pertahanan udara meliputi tiga dimensi yaitu dimensi: (1) kekuatan, (2) kemampuan, dan (3) penggelaran. Dimensi kekuatan, terdiri dari kekuatan organisasi, kekuatan personel, kekuatan materiel, kekuatan fasilitas dan kekuatan peranti lunak. Dimensi kemampuan, terdiri dari kemampuan diplomasi, kemampuan intelijen, kemampuan penyerangan, kemampuan pertahanan, kemampuan khusus, kemampuan pengamanan, kemampuan dukungan, kemampuan integrasi komunikasi dan informasi, kemampuan siber kemampuan perang elektronika, kemampuan pemeliharaan dan kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Dimensi gelar kekuatan terdiri dari penggelaran Mabesau, Kotama operasi, dan Kotama pembinaan.

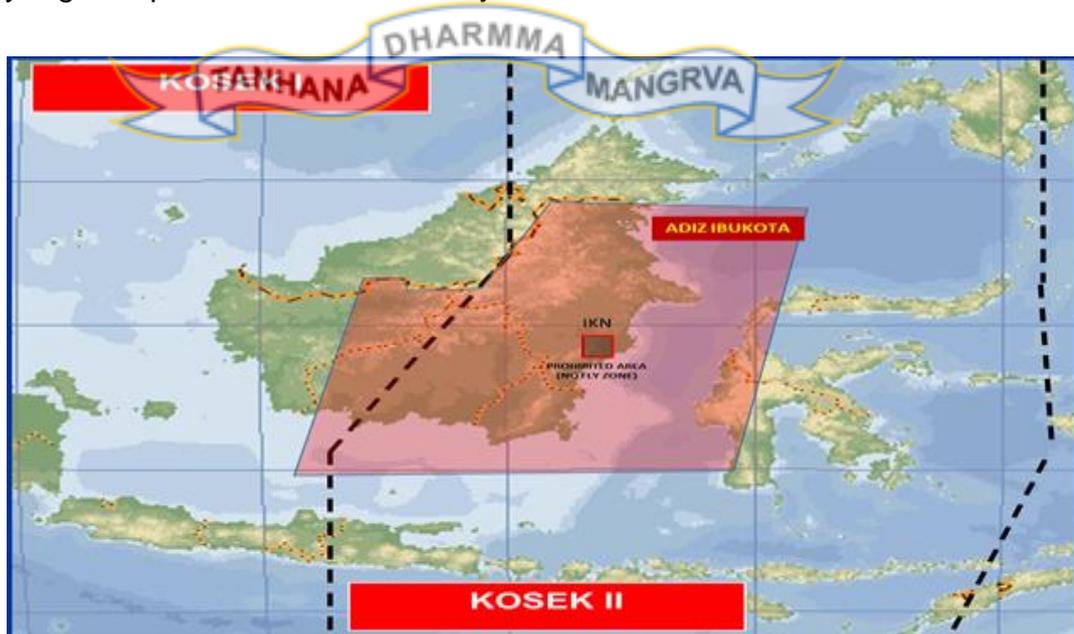
Upaya strategis untuk membangun postur pertahanan udara di wilayah IKN yang penting untuk dilakukan melalui penetapan wilayah operasi pertahanan udara, penetapan ADIZ IKN dan area larangan terbang (*prohibited area*) di wilayah udara IKN, dan penggelaran pertahanan udara berlapis dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Penetapan Wilayah Operasi Hanud.** Pelaksanaan operasi pertahanan udara (Hanud) dalam mengamankan dan mempertahankan wilayah udara IKN dilaksanakan dengan menetapkan sebagian wilayah Kosek I dan Kosek II yang merupakan wilayah udara Ibu kota negara sebagai wilayah pertahanan udara khusus IKN. Wilayah Hanud Khusus IKN (Gambar 4) ini menjadi penting karena terkait dengan pengamanan wilayah ibu kota negara yang merupakan simbol kedaulatan negara. Wilayah tersebut harus benar-benar mendapat jaminan keamanan, khususnya dari berbagai ancaman atau serangan melalui wahana udara. Nantinya, Hanud Khusus IKN dengan komando dan kendali taktis berada pada Komandan Pusat Operasi Sektor Khusus Ibu Kota (Kosek IKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima Koopsudnas dalam mengamankan wilayah udara IKN.



Gambar 4. Penetapan Wilayah Hanud Khusus IKN

- b. **Penetapan ADIZ IKN dan *Prohibited Area*.** Untuk mempermudah pelaksanaan operasi hanud dalam rangka mengamankan wilayah udara Ibu kota Negara baru dan pusat pemerintahan yang bernilai strategis perlu ditetapkan ADIZ (*Air Defence Identification Zone*) IKN disamping ADIZ RI yang berada di seluruh wilayah ZEE Indonesia. ADIZ IKN bertujuan untuk mengidentifikasi semua pesawat yang datang dari luar Kalimantan maupun yang beroperasi domestik di wilayah Kalimantan.

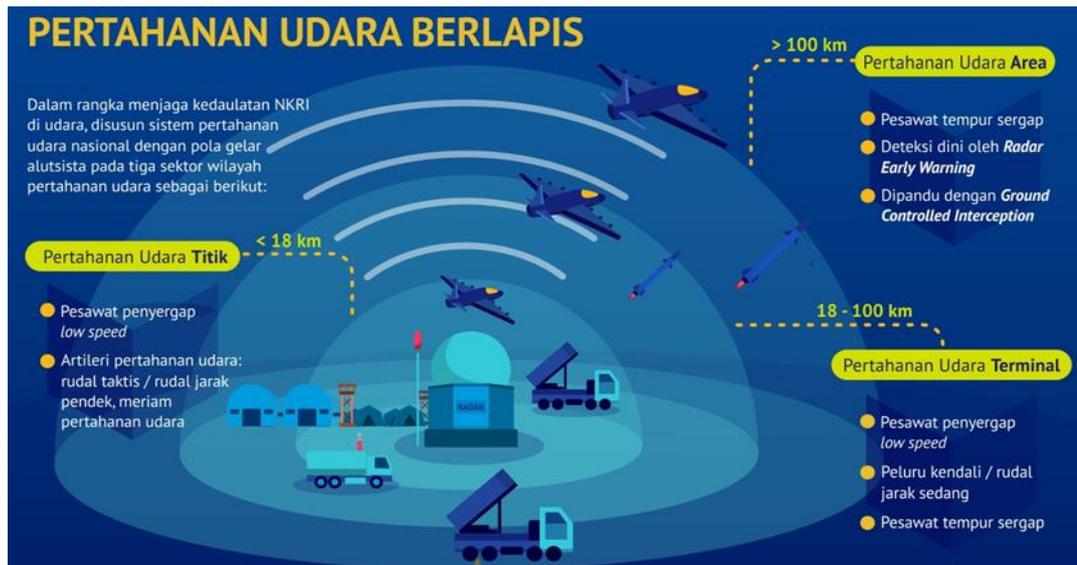


Gambar 5. Penetapan ADIZ IKN dan *Prohibited Area*

Penetapan wilayah operasi pertahanan udara khusus IKN menjadi penting karena komando dan kendali taktis di bawah Kosek IKN yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima Koopsudnas dalam mengamankan wilayah udara IKN sehingga lebih efektif. Oleh karena itu, perlu penetapan ADIZ IKN dan penetapan wilayah larangan terbang atau *prohibited area* (Gambar 5) yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua pesawat yang datang dari luar Kalimantan maupun yang beroperasi domestik di wilayah Kalimantan, sekaligus menetapkan larangan terbang di atas wilayah udara IKN.

c. **Penggelaran Sistem Hanud Berlapis.** Upaya pengamanan wilayah udara di IKN perlu didukung dengan sistem pertahanan udara (Hanud) berlapis yang meliputi: Hanud Area, Hanud Terminal, dan Hanud Titik (Gambar 6). Tanggung jawab masing-masing ditentukan berdasarkan jarak jangkauan alutsista yang digunakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Lapisan pertama adalah hanud titik yaitu wilayah pertahanan udara dengan jarak kurang dari 18 km, disiagakan pesawat penyergap kecepatan rendah (*low speed*), dilengkapi artileri pertahanan udara: rudal taktis atau rudal jarak pendek dan meriam pertahanan udara.
- 2) Lapisan kedua disebut hanud terminal, memiliki jarak antara 18 km sampai dengan 100 km dan alutsista yang digunakan adalah pesawat penyergap *low speed*, rudal jarak sedang, dan pesawat tempur sergap.
- 3) Lapisan ketiga disebut hanud area, memiliki jangkauan jarak lebih dari 100 km, alut sista yang digunakan: pesawat tempur sergap, deteksi dini oleh radar peringatan dini (*early warning*), dan dipandu dengan *ground controlled interception*.



Gambar 6. Ilustrasi Hanud Berlapis: Titik, Terminal, dan Area²⁷

Dari pembahasan Konsep Pertahanan Udara Ibu kota negara di atas yang disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan yang ada, ditinjau dari aspek operasional dan aspek pertahanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. **Aspek Operasional**

1) Pelaksanaan Operasi. Untuk melaksanakan operasi pertahanan udara di wilayah udara IKN perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Pemindahan Mako Koopsudnas. Pemindahan Markas Komando Koopsudnas dilakukan secara bersamaan dengan pemindahan Mabes TNI dan Mabes Angkatan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur dengan seluruh sarana dan prasarana komando dan kendali PangKoopsudnas untuk melaksanakan operasi pertahanan udara nasional.

b) Pembentukan Pusat Operasi Sektor Khusus Ibu Kota. Pusat operasi khusus ibu kota berada di wilayah IKN guna

²⁷ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/pertahanan-udara-berlapis>

melaksanakan operasi pertahanan udara yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima Koopsudnas.

2) Wilayah Operasi. Untuk melaksanakan operasi pertahanan udara di wilayah udara IKN perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Penentuan wilayah udara khusus IKN untuk memudahkan kodal dan lebih fokus dalam mengawasi dan melaksanakan operasi pertahanan udara di wilayah udara ibu kota negara baru.

b) Penetapan *Air Defence Identification Zone* Khusus Ibu Kota Nusantara (ADIZ IKN) dan *Prohibited Area* di istana negara baru dan pusat-pusat pemerintahan yang strategis.

b. **Aspek Pertahanan**

1) Waktu Operasi Hanud. Mengingat posisi IKN berada dekat dengan perbatasan darat dengan Malaysia, dekat dengan Laut Sulawesi yang situasinya cukup rawan serta dekat dengan jalur ALKI II yang merupakan jalur lintas bebas pelayaran dan penerbangan, maka sistim pertahanan udara dan waktu operasinya tidak boleh putus selama 24 jam sehari sepanjang tahun, sehingga sangat diperlukan kesiapan alutsista pertahanan udara yang handal dan dukungan operasi yang terencana dengan baik.

2) Penggelaran Unsur Hanud

a) Unsur Tempur Sergap

(1) Penambahan dan penggelaran unsur tempur sergap (TS) dengan pesawat F-16 atau Sukhoi 27/30/35 secara permanen di Lanud Dhomber Balikpapan untuk mengkover wilayah Kalimantan. Lanud Dhomber merupakan pangkalan udara yang sangat strategis, baik

dari aspek posisi/lokasi maupun dari aspek dukungan operasi penerbangan.

(2) Penggelaran secara periodik unsur tempur sergap (TS) di Lanud Anang Busra (ANB) Tarakan untuk mengamankan wilayah perbatasan Kalimantan bagian utara. Penggelaran unsur tempur di Lanud ANB ini, sekaligus mewujudkan *bare base concept* yaitu konsep menyiapkan Lanud dengan dukungan fasilitas serta pengawakan minimal namun dapat ditingkatkan dengan cepat dalam mendukung operasi udara.

b) Unsur Radar

(1) *Upgrade* peralatan dan kemampuan atau penggantian Radar baru untuk Satrad Balikpapan guna mendukung operasi pertahanan udara di wilayah udara IKN.

(2) *Upgrade* peralatan dan kemampuan atau penggantian Radar baru untuk Satrad Tarakan guna mendukung operasi pertahanan udara di wilayah udara Ibu kota Negara dan perbatasan Kalimantan Utara.

(3) Pengadaan Radar baru yang digelar di Singkawang/Pemangkat untuk mendukung operasi pertahanan udara di wilayah udara Ibu kota Negara dan perbatasan Kalimantan Barat.

(4) Pengadaan Radar baru yang digelar di sekitar Banjarmasin untuk mendukung operasi pertahanan udara di wilayah udara Ibu kota Negara dan perbatasan Kalimantan Selatan.

(5) Pengadaan Radar Medium baru yang digelar di sekitar Putusibau untuk mendukung operasi pertahanan udara di wilayah udara Ibu kota Negara dan perbatasan tengah Kalimantan.

(6) Pengadaan Radar Pasif baru yang digelar di sekitar Tarakan untuk mendukung operasi pertahanan udara di wilayah udara Ibu kota Negara dan mengawasi perbatasan Kalimantan Utara.

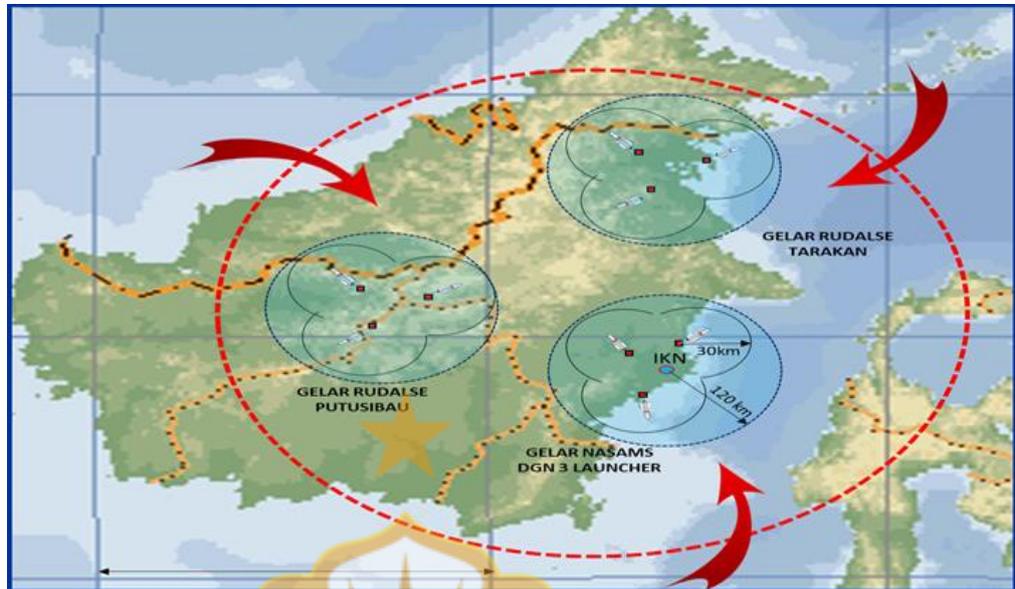
c) Unsur Rudal dan Meriam Hanud

(1) Pengadaan Rudal Jarak Sedang (NASAMS) yang digelar di Balikpapan sebanyak minimal 3 *launcher* mengelilingi ibu kota negara dengan *fire distribution center* (FDC) dan Radar yang terintegrasi dengan Posek Khusus ibu kota (Gambar 7). Kemampuan Radar minimum 120 km dan kemampuan jarak efektif Rudal adalah 30 km.

(2) Pengadaan Rudal Jarak Sedang yang digelar di Tarakan untuk melindungi perbatasan Kalimantan bagian utara dari serangan udara. Digelar sebanyak 3 *launcher* di perbatasan Kalimantan Utara dengan satu FDC dan Radar yang terintegrasi dengan Posek serta dilengkapi komunikasi dengan Posek ibu kota. Kemampuan Radar minimum 150 km dan kemampuan jarak efektif Rudal adalah 50 km.

(3) Pengadaan Rudal Jarak Sedang yang digelar di sekitar Putusibau sebanyak minimal 3 *launcher* untuk melindungi perbatasan Kalimantan Utara dan Tengah dengan FDC dan Radar yang terintegrasi dengan Posek

Khusus Ibu kota. Kemampuan Radar minimum 150 km dan kemampuan jarak efektif Rudal adalah 50 km.



Gambar 7. Gelar NASAMS, Rudal Sedang Tarakan dan Putusibau

(4) Pembentukan Detasemen Hanud Pasgat di Balikpapan yang dilengkapi dengan Rudal dan Meriam Hanud Oerlicon, Rudal QW 3 dan *Radar Mobile Smart Hunter* untuk melaksanakan Hanud titik untuk mempertahankan pangkalan dari serangan udara musuh (Gambar 8).



Gambar 8. Gelar Oerlicon Denhanud di IKN

d) Pengadaan minimal 4 Unit Anti Drone yang dilengkapi Drone Buster dan minimal 2 unit *Global Positioning System* (GPS) Jammer untuk pengamanan Objek Vital Nasional dan kegiatan *Very Very Importance Person* (VVIP) di IKN.

(1) Anti Drone. Diperlukan minimal 4 unit Anti Drone untuk mengamankan Objek Vital Nasional dan Kegiatan VVIP di Ibu kota Negara yang terdiri dari 2 Unit Anti Drone Mobile dan 2 Unit Anti Drone Statis serta dilengkapi dengan Drone Buster. Penggelaran unit Anti Drone baik yang mobile maupun statis disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan dan kegiatan yang dilaksanakan.

(2) GPS *Jammer*. Diperlukan minimal 2 unit GPS *Jammer* dalam mengamankan Objek Vital Nasional dan kegiatan VVIP di wilayah Ibu kota Negara baru. Penggelaran dan pengoperasian GPS *Jammer* bersifat *stand by* dan disesuaikan dengan kebutuhan dan eskalasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya strategis untuk membangun postur pertahanan udara di wilayah IKN yang penting untuk dilakukan, diantaranya adalah: menetapkan wilayah operasi pertahanan udara, penetapan ADIZ IKN dan *prohibited area*, penggelaran Hanud berlapis, memindahkan Mako Koopsudnas, membentuk pusat operasi sektor khusus di IKN, menggelar unsur tempur sergap (TS) di Lanud aju, mengupgrade atau penggantian Radar baru, mengadakan rudal jarak sedang (NASAMS) yang digelar di Balikpapan, membentuk Detasemen Hanud Pasgat, dan menambah unit anti drone.

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara yang dijabarkan dalam empat sub bahasan, meliputi: postur pertahanan udara yang handal, proyeksi ancaman militer di IKN; pengaruh faktor Astagatra yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial di IKN yang menjadi pertimbangan dalam membangun postur pertahanan; dan upaya strategis untuk membangun postur pertahanan di wilayah IKN maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Postur pertahanan udara yang tangguh, efisien, dan efektif tidak dapat dipisahkan dari postur pertahanan militer (TNI). Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. Sementara itu, unsur pertahanan udara untuk mengamankan wilayah udara IKN yang paling utama, meliputi: unsur tempur sergap, unsur radar, dan unsur rudal.

1) *Radius of Action* (RoA) unsur TS dari empat pangkalan udara induk (IWJ, RSN, SPO, dan HND) belum optimal dalam mengkover wilayah udara IKN, khususnya terhadap sasaran yang datang dari arah utara.

2) Dari sisi unsur radar, sudah ada tiga Satrad yang berada di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang mampu mengkover wilayah udara IKN yaitu Satrad 223 (Balikpapan), Satrad 225 (Tarakan), dan Satrad 224 (Kwandang, Gorontalo Utara).

3) Sampai saat ini, baru ada satu Satrudal 111 di Teluk Naga, Tangerang yang disiagakan untuk mengamankan wilayah ibu kota Jakarta. Dengan pemindahan ibu kota negara maka perlu dibangun Satrudal agar mampu menjaga keamanan wilayah di IKN.

b. Pemindahan ibu kota negara berarti pemindahan lokasi/tempat sehingga berdampak pada potensi ancaman. Proyeksi ancaman dapat dibedakan menjadi kemungkinan ancaman dan prediksi ancaman.

1) Kemungkinan ancaman militer dapat bersumber dari darat, laut, dan udara dengan arah ancaman dari arah utara dan timur wilayah Kalimantan Timur. Sementara bentuk ancaman udara dapat berupa pesawat udara berawak/tidak berawak dan benda lainnya yang menggunakan wahana udara

2) Prediksi ancaman di Kalimantan Timur adalah perang (*limited war*), intervensi militer asing, campur tangan kekuatan asing, degradasi moral, terorisme, narkoba, perebutan sumber daya alam, dan pelanggaran wilayah udara.

c. Dalam membangun postur pertahanan guna mengamankan wilayah IKN dipengaruhi oleh faktor Astagatra, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Posisi Geografi. Di sebelah utara IKN berbatasan darat dengan Malaysia, berdekatan dengan Laut Sulawesi yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina, dan di sebelah timur terbentang jalur ALKI II (Laut Sulawesi sampai selatan Selat Lombok) yang merupakan jalur bebas. Posisi tersebut menyebabkan IKN rawan terhadap serangan musuh, baik dari darat maupun laut.

2) Kondisi Demografi. Jumlah dan kualitas SDM menjadi kunci dalam postur pertahanan, terutama sebagai tenaga kerja untuk mendukung industri di bidang pertahanan. Penyebaran penduduk di perbatasan Kalimantan masih jarang (± 18 jiwa/Km²) sehingga dari aspek keamanan merupakan daerah yang rawan disusupi oleh berbagai kelompok kriminal, seperti terorisme dan penyelundupan narkoba.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). SKA yang melimpah merupakan anugerah bagi masyarakat sehingga IKN Kalimantan

Timur memiliki lebih banyak sumber daya keuangan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan militer. Di sisi lain, dapat menjadi pemicu perebutan sumber daya oleh kelompok/negara lain.

4) Ideologi. Terdapat sekelompok Ormas/Kelompok Masyarakat tertentu yang menuntut berdirinya khilafah seperti yang disuarakan oleh HTI. Demikian juga dengan jaringan terorisme masih tumbuh dan berkembang di wilayah Kalimantan Timur dengan sel-sel tidur yang sewaktu-waktu dapat melakukan aksi terorisme. Hal tersebut ditandai dengan adanya kelompok-kelompok radikal eks narapidana teroris yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

5) Politik. IKN berbatasan dengan negara-negara tetangga sehingga hubungan politik/diplomasi sangat penting. Pembangunan postur pertahanan harus mempertimbangkan faktor-faktor diplomasi dan hubungan bilateral agar tidak menimbulkan ketegangan atau konflik potensial dengan negara tetangga. Konflik politik diperkirakan akan semakin memanas memasuki tahun 2024. Pembangunan IKN dapat menjadi isu pro dan kontra bagi para capres maupun caleg.

6) Ekonomi. Arus distribusi bahan pangan, materiil pokok bangunan seperti pasir, batu, kapur serta bahan konstruksi lainnya tidak lancar karena sarana perhubungan masih terbatas. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan postur pertahanan dapat melibatkan perusahaan-perusahaan lokal atau nasional dalam proyek-proyek pertahanan yang sekaligus dapat membuka peluang kerja serta meningkatkan ekonomi lokal.

7) Sosial Budaya. Penguatan kesadaran terhadap ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, akan membantu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pertahanan. Lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengedukasi generasi muda tentang

pentingnya pertahanan nasional. Peran perempuan dalam pembangunan postur pertahanan juga penting untuk diperhatikan.

8) Pertahanan. Ancaman dapat berasal dari ancaman militer, ancaman non-militer seperti terorisme, perdagangan ilegal, konflik etnis, dan gangguan siber. Pembangunan infrastruktur pertahanan yang kuat dan canggih akan menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman keamanan. Kalimantan Timur berbatasan dengan negara-negara tetangga sehingga kerjasama regional dan internasional dalam bidang pertahanan sangat penting. Kerjasama regional/internasional dapat membangun kepercayaan, meningkatkan keamanan bersama, dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut.

d. Upaya strategis untuk membangun postur pertahanan udara di wilayah IKN yang penting untuk dilakukan melalui penetapan wilayah hanud khusus IKN, penetapan ADIZ IKN dan *prohibited area*, serta beberapa upaya strategis lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penetapan wilayah Hanud Khusus IKN sangat penting karena terkait dengan pengamanan wilayah ibu kota negara yang merupakan simbol kedaulatan negara.

2) Untuk mempermudah pelaksanaan operasi hanud dalam rangka mengamankan wilayah udara yang bernilai strategis perlu ditetapkan ADIZ IKN untuk mengidentifikasi semua pesawat yang datang dari luar Kalimantan maupun yang beroperasi di wilayah Kalimantan.

3) Upaya strategis lainnya, meliputi: menerapkan sistem pertahanan udara berlapis (titik, terminal, dan area), memindahkan Mako Koopsudnas, membentuk pusat operasi sektor khusus di IKN, menggelar unsur tempur sergap (TS) di Lanud aju, mengupgrade atau penggantian radar baru, mengadakan rudal jarak sedang

(NASAMS) yang digelar di Balikpapan, membentuk Detasemen Hanud Pasgat, dan menambah unit anti drone.

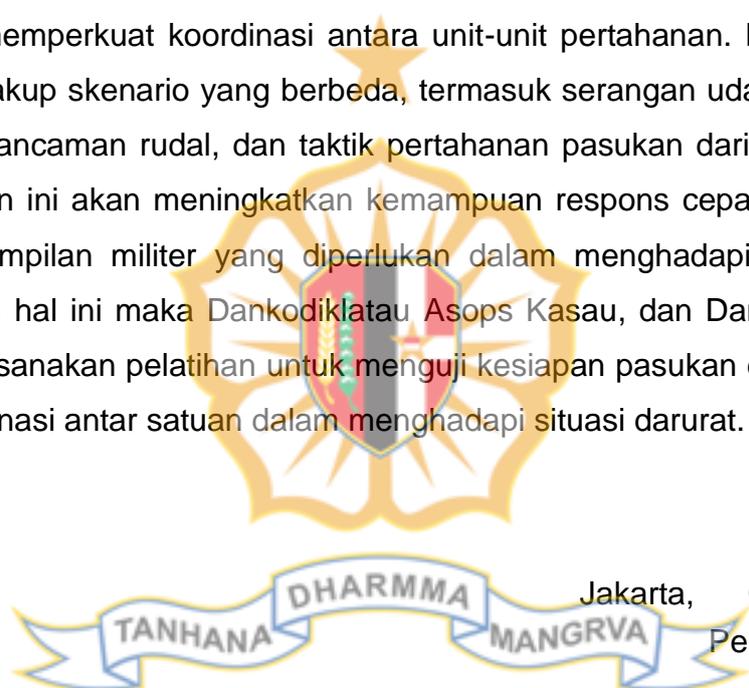
18. Rekomendasi

Pembangunan postur pertahanan guna menjaga keamanan wilayah Ibu Kota Nusantara merupakan langkah yang mendesak untuk dilakukan. Terlebih lagi, pemindahan ibu kota negara adalah memindahlan *center of gravity*, baik sebagai simbol negara maupun simbol kedaulatan. Terkait dengan kondisi tersebut, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Sistem Pertahanan Udara Berbasis Rudal.** Mendirikan sistem pertahanan udara berbasis rudal dengan cakupan yang luas dan teknologi canggih di wilayah strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara Kaltim. Sistem ini harus terdiri dari rudal anti-pesawat, rudal anti-rudal, dan sistem rudal pertahanan udara yang mampu menghadapi ancaman dari berbagai jarak dan ketinggian. Penempatan dan koordinasi yang tepat dari sistem-sistem ini akan memberikan pertahanan udara yang lebih efektif. Untuk itu, Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan Mabes Angkatan Udara perlu menyusun kebutuhan peralatan sistem pertahanan udara berbasis rudal dan menjadikannya sebagai prioritas pengadaan.
- b. **Peningkatan Radar dan Sistem Deteksi.** Memperkuat jaringan radar udara dan sistem deteksi lainnya di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara Kaltim. Peningkatan ini meliputi pembaruan teknologi radar, penggunaan radar pasif, dan integrasi data dari berbagai sensor untuk mencapai gambaran situasional yang lebih lengkap dan *real-time*. Dengan pemantauan yang lebih baik, ancaman dari udara dapat dideteksi lebih awal dan memberi waktu yang cukup untuk merespons secara tepat. Untuk itu, Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan Mabes Angkatan Udara perlu menyusun kebutuhan pengadaan Radar dan sistem deteksi yang lengkap dan *real-time*.
- c. **Pembangunan Pangkalan Militer Udara yang Terintegrasi.** Mendirikan pangkalan militer udara yang terintegrasi dan modern di wilayah

Ibu Kota Nusantara Kaltim. Pangkalan ini harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti hanggar pesawat, landasan pacu, sistem perbaikan, dan stasiun pengendali udara. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi yang aman dan enkripsi data juga perlu diperhatikan untuk melindungi informasi strategis. Untuk itu, Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan Mabes Angkatan Udara perlu menyusun kebutuhan pembangunan Lanud yang terintegrasi dan modern di IKN.

d. **Pelatihan dan Latihan Militer Rutin.** Melakukan latihan militer rutin dan simulasi skenario pertahanan udara untuk menguji kesiapan pasukan dan memperkuat koordinasi antara unit-unit pertahanan. Latihan ini harus mencakup skenario yang berbeda, termasuk serangan udara dari berbagai arah, ancaman rudal, dan taktik pertahanan pasukan dari infiltrasi musuh. Latihan ini akan meningkatkan kemampuan respons cepat dan mengasah keterampilan militer yang diperlukan dalam menghadapi situasi darurat. Dalam hal ini maka Dankodiklatau Asops Kasau, dan Dankorpasgat perlu melaksanakan pelatihan untuk menguji kesiapan pasukan dan memperkuat koordinasi antar satuan dalam menghadapi situasi darurat.



Jakarta, Oktober 2023
Penulis

Meka Yudanto, S.Sos., M.A.P
Marsekal Pertama TNI



**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**